

MENJADIKAN MASYARAKAT KONSUMEN YANG CERDAS

04 Ruang Utama

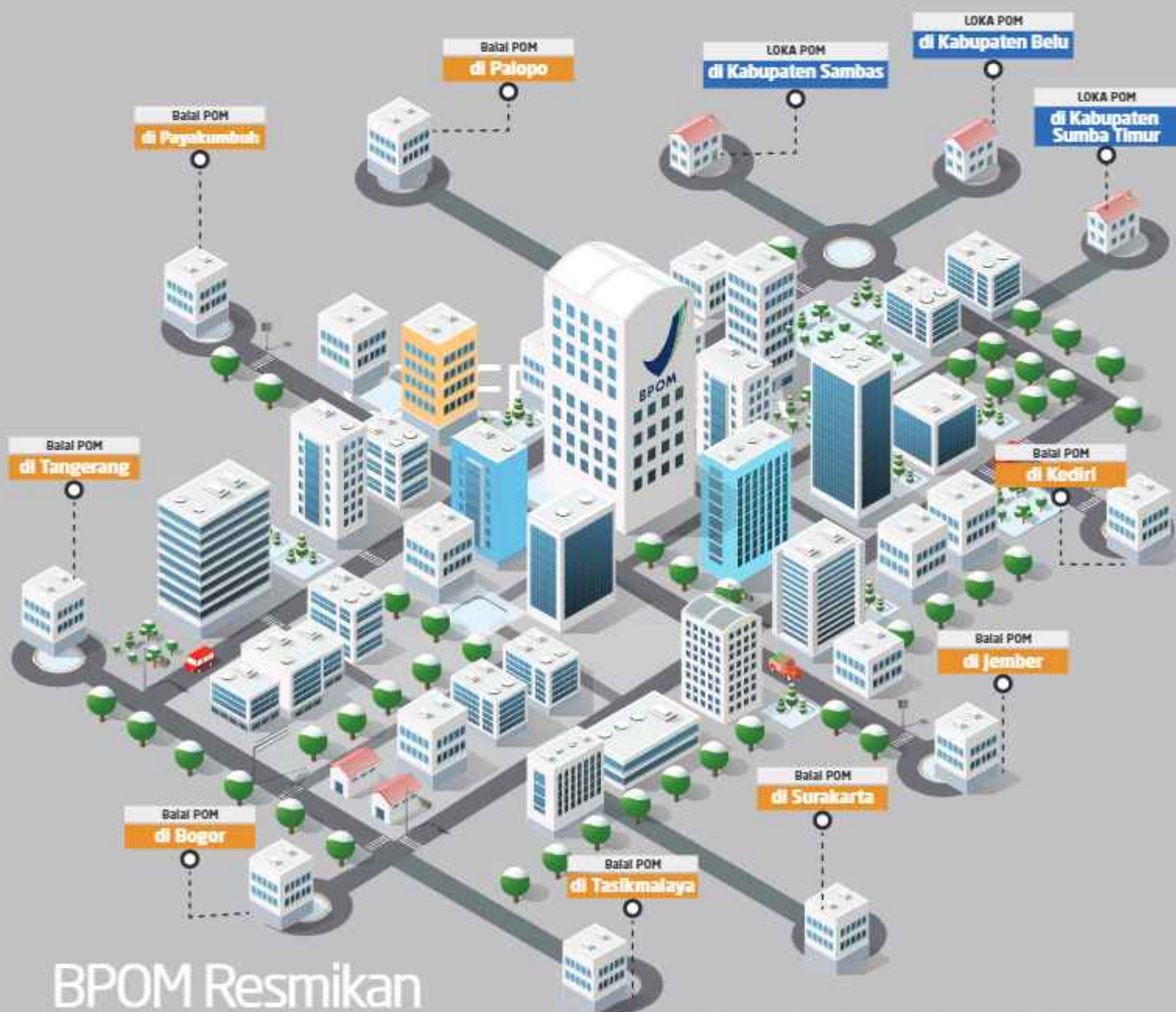
REN 2023

38 Ruang Tamu

Menteri PANRB
Abdullah Azwar Anas

50 Ruang Kerja

Kolaborasi WHO dan BPOM
Menuju dunia bebas polio



BPOM Resmikan

3 LOKA POM dan 8 BALAI POM



Ilustrasi Cover: Moon, Rahardi Putranto



Majalah Pengawasan Obat dan Makanan

Vol.5/No.4/2023

ISSN 2808-4683



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin dari penerbit.



Untuk memperbanyak atau membutuhkan MaPOM dengan jumlah tertentu, **serta saran dan masukan untuk MaPOM**, silahkan menghubungi tim redaksi MaPOM lewat *scan barcode* berikut:



Tim redaksi akan memberikan **hadiah menarik** untuk **3 pemberi saran/masukan yang paling kreatif**.

Salam Sehat

Susunan Redaksi

Pengarah

Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

Pembina

Dra. Rita Maryona, Apt., M.Si

Pemimpin Redaksi

Noorman Efendi, SP., M.Si

Tim Redaksi

Bka Roemalasari, S.Si., Apt., M.KM.
Hendriq Fauzan Kusfanto, S.Farm., Apt
Gita Indah Nundy Sari, S.Farm., Apt
Fathani Nur Hamidi, S.Sos.
Dian Hermawati, S.Farm., Apt

Tim Sekretariat

Titi Kuswanto, S.E
Zulfikar Rasyad Listyanto, S.Kom
Fadila Utami, S.Ak
Faisal Nur Jabbar, A.Md

Tim Penulis

Nelly Luthiani Rachman, S.Sos
Deli Oktaviani, S.I.Kom
Maum Muhammad Adib, S.Sos.
Zain Fadhlurrahman, S.T.P
Fadila Utami, S.Ak
Benny Robin, S.E
Fadlan Khaerul Anam, S.Sos
Yanuar Rahman, S.I.Kom
Moch. Rahard Putranto, S.Ars
Muhammad Rizki, S.E
Chandra Wino Adhanunggar, S.I.Kom
Devlin Ariana Lukhaila, S.A.P
Irfan Mustopa, S.Kom
Eva Kartika, S.Farm., Apt
Aisya Utami Rahayu, S.Farm., Apt
Rini Setyowati, S.Farm., Apt
Lindayana, S.Si., Apt., M.Biomed
Putri Syajarwati, S.Farm., Apt
Tatiana Samantha Putri, S.Si.
Anitha Dini Sorgani, S.Farm., Apt

Alamat

Jl. Percetakan Negara Nomor 23,
Jakarta - 10560, Indonesia
Phone: (+62)21 4244691/42883309/42883462
FAX: (+62)21 4263333
SMS: (+62) 8121 9999 533

Saat ini BPOM telah memiliki 76 unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ke-76 UPT ini merupakan akumulasi perkuatan kelembagaan melalui pembentukan tiga Loka POM dan peningkatan delapan Loka POM menjadi Balai POM. Tentu bukan tugas mudah mengawasi obat dan makanan di negara kepulauan dengan jumlah lebih dari 17 ribu pulau. Tapi setidaknya perkuatan ini bisa menjadi amunisi segar pengawasan hingga pelosok negeri.

Pembentukan dan perkuatan jaringan pengawasan obat dan makanan di daerah juga diharapkan mampu mempererat sinergi lintas sektor terkait. Cerita menarik ini akan kami sajikan dalam rubrik Ruang Utama bersama sajian utama lainnya mengenai penanaman 16 ribu pohon mangrove pada 2023 sebagai wujud komitmen BPOM dan lintas sektor dalam mendukung Net-Zero Carbon Programme di Indonesia, serta refleksi dan resolusi pengawasan obat dan makanan berkelanjutan.

Seluruh upaya dan kemajuan ini tidak terlepas dari peran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dalam mendukung reformasi birokrasi dan penguatan kelembagaan di BPOM. Kisah eksklusif ini kami hadirkan dalam rubrik Ruang Tamu bersama Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas.

Dalam rubrik Ruang Belajar, pembaca diajak untuk mengenal lebih jauh tentang SAKA POM dan perannya dalam pengawasan obat dan makanan. Peran generasi muda menjadi penting. Karena itu di rubrik ini juga mengulas bagaimana BPOM menggandeng generasi milenial untuk berperan aktif dalam edukasi terkait pangan olahan bernutrisi.

Selanjutnya di rubrik Jendela, kami mengangkat pentingnya penerapan cara distribusi obat yang baik (ODOB) oleh instalasi farmasi pemerintah (IFP) dan dampaknya bagi penyediaan akses obat yang aman bagi masyarakat. Masih dalam rubrik yang sama, pembaca juga bisa memahami penerapan standar internasional Codex dalam sistem pengawasan pangan, serta keuntungan penerapan Codex bagi industri di Indonesia.

MaPOM edisi ini juga akan mengangkat kisah tentang kolaborasi dan peran *beauty enthusiast* dalam pengawasan obat dan makanan khususnya kosmetik, juga bagaimana optimalisasi peran tenaga kesehatan dalam monitoring efek samping obat bahan alam.

Tak kalah penting, adalah sinergi dan kolaborasi WHO dan BPOM dalam meningkatkan akses Vaksin n-OPV aman dan bermutu di dunia. Juga bagaimana BPOM menyiapkan agen perubahan untuk ikut berkomitmen dalam pengendalian resistansi antimikroba di Indonesia.

Pada kesempatan ini, segenap awak redaksi MaPOM mengucapkan Selamat Idulfitri 1445 H. Kami berharap momentum hari raya ini akan melahirkan semangat baru untuk terus mempersembahkan kinerja terbaik bagi masyarakat. Semoga artikel yang kami sajikan bisa menjadi inspirasi hangat di tengah keluarga. ■

Pemimpin Redaksi MaPOM



DENAH

BERANDA 01

HALOBPOM 03

RUANG UTAMA 04

BPOM Jaga Harmoni Lingkungan
Melalui Net - Zero Carbon Programme
Perluas Jangkauan Pengawasan
BPOM Resmikan 3 Loka POM dan 8 Balai POM
REN 2023
Evaluasi Mendorong Resolusi
Pengawasan Obat dan Makanan Berkelanjutan

RUANG BELAJAR 14

SAKA POM Nasional Disahkan
Jutaan Kader Pratiuka Akan Perkuat Pengawasan di Seluruh Indonesia
Kreatif dan Tertib dalam Beriklan
Kolaborasi Mahasiswa dan UMKM Pangan Olahan
Generasi Zillennial
Sendi Indonesia Emas dalam Mendorong
Kebiasaan Sehat di Masyarakat
Waspada Alergen pada Pangan Olahan
AYO BACA LABEL

JENDELA 24

Stamina BPOM
Kawal Distribusi Obat Instalasi Farmasi Pemerintah
Vaksin Valenina
Selamatkan Anak Indonesia dari Pneumonia
Germas SAPA Dukung
Visi Indonesia Emas 2045
CODEX Indonesia
Jaga Keamanan Pangan dan Lindungi Daya Saing Bangsa

BINGKAI 34

Berikan Kemudahan Perizinan Berusaha
BPOM Raih Penghargaan

RUANG TAMU 38

Abdullah Azwar Anas
Menteri PANRB

GALERI 42

Dokumentasi Kegiatan Strategis

RUANG KERJA 48

Beauty Enthusiast
Kolaborasi Peningkatan Literasi Kosmetik Aman
Kolaborasi WHO dan BPOM
Menuju Dunia Bebas Polio
Resistensi Anti Mikroba
Pandemi Senyap yang Perlu Dikendalikan
Tenaga Kesehatan
Ujung Tombak Penerapan Monitoring Efek Samping Obat Bahan Alam
Kolaborasi Efektif
Hasilkan Produk Biologi Inovatif



4



24



26



50

Tanya HALOBPOM:

Berapa lama *timeline* penilaian produk pangan olahan pada aplikasi <https://ereg-rba.pom.go.id/>



HALOBPOM Menjawab:

Timeline penilaian produk pangan olahan yaitu:

1. Registrasi pangan olahan risiko menengah rendah (MR) memiliki Service Level Agreement (SLA) 1 Hari Kerja, meliputi:
 - Registrasi baru pangan olahan tanpa klaim, tanpa peruntukan, dengan atau tanpa penyimpanan beku, disertai: penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) tanpa aditif atau tanpa batas maksimum (CPPB), atau tanpa penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) atau bahan baku yang memiliki batas maksimum penggunaan. Untuk pangan dengan penyimpanan beku hanya untuk pangan olahan yang memerlukan pengolahan sebelum dikonsumsi
 - Registrasi ulang
 - Registrasi variasi minor seluruh pangan (MR, MT, T)
 - Registrasi variasi mayor pangan risiko menengah rendah
2. Registrasi pangan olahan risiko menengah tinggi (MT) memiliki SLA 5 hari kerja, meliputi:
 - Registrasi baru pangan wajib SNI
 - Registrasi variasi mayor pangan risiko menengah tinggi
3. A) Registrasi pangan olahan risiko tinggi (notifikasi) memiliki SLA 15 Hari Kerja, meliputi:
 - Registrasi baru pangan risiko tinggi dengan program manajemen risiko (PMR), sertifikat SNI (sukarela), pangan sejenis (risiko tinggi) yang telah memiliki izin edar, dan pangan organik
- B) Registrasi pangan olahan risiko tinggi (T) memiliki SLA 30 Hari Kerja, meliputi:
 - Registrasi baru pangan olahan untuk keperluan gizi khusus (PKGK)
 - Registrasi baru pangan berklaim, pangan genetically modified organism (GMO), iradiasi, pangan menggunakan btp/ bahan baku tertentu yang mempunyai batas maksimum penggunaan, BTP, minuman beralkohol, pangan olahan dengan proses pasteurisasi, sterilisasi komersial/teknologi baru lainnya
 - Registrasi variasi mayor pangan risiko tinggi. ■



BPOM, Asosiasi serta Industri Obat dan Makanan melakukan penanaman mangrove *Rhizophora Mucronata* pada Net-Zero Carbon Programme, Selasa (31/10/2023).



Penulis : Devi Oktaviani
Editor : Fathin Nur Hanidli

BPOM Jaga Harmoni Lingkungan Melalui Net-Zero Carbon Programme

Sinergi pelestarian alam digaungkan BPOM bersama asosiasi serta industri obat dan makanan melalui Net-Zero Carbon Programme. Melalui konservasi mangrove, kerja sama ini diharapkan dapat mengurangi jumlah gas rumah kaca (GRK) di lingkungan yang berasal dari proses produksi industri obat dan makanan.

Pencemaran lingkungan adalah 'penyakit' tak terobati. Kerusakan lingkungan perlahan mulai terasa imbasnya bagi masyarakat. Fenomena ini meningkatkan kewaspadaan banyak pihak untuk segera berkontribusi memperbaiki alam sedini mungkin demi keberlanjutan pembangunan suatu bangsa. Hal ini juga yang kemudian menggugah inisiatif BPOM dengan mengajak industri obat dan makanan untuk ikut berkontribusi nyata dalam pelestarian alam, salah satunya melalui Net-Zero Carbon Programme.

Dukungan Net-Zero Carbon Programme digarap BPOM melalui konservasi ekosistem mangrove yang

diharapkan dapat mengurangi jumlah GRK yang berasal dari proses produksi industri obat dan makanan. Peran mangrove sebagai karbon biru (karbon yang tersimpan di ekosistem pesisir dan laut) dapat diandalkan sebagai penyerap dan penyimpan karbon. Salah satu varietas mangrove yang ditanam dalam program BPOM adalah *Rhizophora Mucronata*, sejenis pohon yang tumbuh di sepanjang garis pantai dan terkenal karena kemampuannya bertahan dalam kondisi tanah berlumpur dan air asin.

Kepala BPOM Periode 2016-2023, Penny K. Lukito menyampaikan bahwa penanaman mangrove ini merupakan bukti nyata komitmen BPOM dan para stakeholder untuk mendukung

pengurangan emisi karbon di DKI Jakarta. "BPOM juga harus peduli pada lingkungan karena industri obat dan makanan merupakan salah satu kontributor yang turut memberikan waste pada lingkungan," ujarnya.

"Net-Zero Carbon Programme merupakan lanjutan dari kegiatan BPOM sebelumnya, yaitu pemberian award kepada industri farmasi dan makanan yang mendukung kelestarian lingkungan (*environmental sustainability*) pada 17 Juli 2023," ujar Penny K. Lukito saat meresmikan kegiatan konservasi ekosistem mangrove bertepatan "Pelaku usaha obat dan makanan mendukung Net-Zero Carbon Programme", di Jakarta pada Oktober 2023.

Dalam pelaksanaannya, program ini dilakukan melalui konservasi ekosistem mangrove dengan berkolaborasi bersama pelaku usaha obat dan makanan. Gerakan ini dimulai dengan penanaman 160 pohon mangrove secara simbolis di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk (TWAAK) dan Ekowisata Mangrove Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara untuk selanjutnya diikuti sebanyak 16 ribu pohon di tahun 2023. Mangrove diprediksi mampu menyerap GRK sebesar 345,3 ton ekuivalen karbon dioksida (CO_2e).

Selanjutnya, secara bertahap selama 3 tahun ke depan, BPOM menargetkan penanaman sebanyak 47,6 ribu pohon mangrove pada 6 hektar lahan di Jakarta dengan perkiraan kontribusi serapan karbon sebesar 1.398 ton CO_2e setiap tahun. Kemudian dilanjutkan dengan penanaman minimal 30 ribu pohon pada 2024–2026 yang juga akan mampu menyerap 760 ton CO_2e per tahun.

Penanaman mangrove juga dilakukan secara serentak di pesisir pantai di seluruh provinsi di Indonesia oleh 76 unit pelaksana teknis BPOM (BBPOM/ Balai POM/Loka POM) dengan para *stakeholder* di daerah masing-masing. Target sebanyak 64 ribu pohon mangrove akan ditanam bersama dan diharapkan mampu menyerap 1.398 ton CO_2e per tahun. Target penanaman pohon akan dilakukan secara bertahap selama 3 tahun dengan jumlah total 100 ribu pohon, yang juga akan menambah kapasitas GRK sebesar 2.177 ton CO_2e per tahun.

Kawal Komitmen Industri Obat dan Makanan

Tak hanya sendiri, BPOM menggandeng 8 asosiasi dan 106 industri

obat dan makanan untuk berpartisipasi dalam penanaman mangrove sebanyak 10.860 pohon di area Kawasan Ekowisata pada tahun 2023 dan sebanyak 36.966

pelestarian alam. Lingkungan yang sehat dan bersih dari polusi berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.



Penandatanganan MoU "Pelestarian Alam sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan melalui Penanaman Mangrove" pada Selasa, 31/10/2023 di Taman Wisata Alam Angke Kapuk

pohon di area Taman Wisata Alam Angke Kapuk (TWAAK) pada tahun 2023–2027.

Kolaborasi ini kemudian disahkan menjadi dasar kerja sama tertulis melalui *memorandum of understanding* (MoU) multipihak tentang Pelestarian Alam sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan melalui Penanaman Mangrove. MoU ini ditandatangani oleh Kepala BPOM, 8 pimpinan asosiasi obat dan makanan, pimpinan pengelola TWAAK, dan pimpinan pengelola Kawasan Ekowisata Mangrove PIK.

Perjanjian kerja sama antara BPOM dan asosiasi serta industri obat dan makanan dilakukan karena Net-Zero Carbon Programme berkelanjutan setiap tahun, sehingga memerlukan komitmen para pihak yang dilegitimasi melalui MoU. Dari kolaborasi multipihak ini, diharapkan dapat mendorong kepedulian pelaku usaha obat dan makanan dalam

"Kita menunjukkan bahwa dunia usaha obat dan makanan tidak hanya peduli dengan profit, tapi juga ikut membangun masyarakat dan lingkungan."

Kepala BPOM, Penny K Lukito

Anugerah Kolaborasi Penanaman Mangrove di Seluruh Indonesia

Sinergi multipihak ini mendapatkan apresiasi dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai program pertama Net Zero Carbon Emission melalui Penanaman Mangrove dengan Kolaborator Perusahaan Obat dan Makanan. BPOM berhasil menggerakkan industri obat dan makanan sebagai program pertama Net-Zero Carbon Emission dengan kolaborasi terbesar melalui penanaman mangrove di pantai wilayah Indonesia.

Dalam program ini, BPOM berperan aktif mengawal keterlibatan *stakeholder*, khususnya industri obat dan makanan untuk ikut bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Dengan peresmian kegiatan di lokasi transplantasi ini menjadi simbol bahwa kita umat manusia akan terus bergerak bersama generasi muda untuk melindungi dan menjaga alam negeri ini dari kerusakan lingkungan akibat pemanasan global. ■



Gerakan Penanaman Mangrove di Ekowisata Mangrove Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara oleh UPT dan *Stakeholder* BPOM.



Perluas Jangkauan Pengawasan BPOM Resmikan 3 Loka POM dan 8 Balai POM



Penulis : Deshita Ariana Luthifata
Editor : Fathma Nur Hamidi

Tantangan pengawasan obat dan makanan yang kian kompleks harus diimbangi dengan sebaran UPT BPOM di sejumlah wilayah Indonesia. Karena itu, BPOM meresmikan tiga Loka POM dan delapan Balai POM untuk menjangkau pengawasan dan memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat di seluruh penjuru tanah air.



Kepala BPOM 2016-2023, Penny K. Lukito menandatangani prasasti peresmian UPT BPOM di Pendopo Panjalu Jayati di Kediri, Jawa Timur, (24/10/2023)

Menjelajah Indonesia seakan tak ada habisnya. Gugusan ribuan pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke menyuguhkan kekayaan alam yang tak tertandingi. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia merupakan 'laboratorium raksasa' yang mengagumkan. Karena itu, beragam peluang dan tantangan terus berkembang dari setiap proses pembangunan. Termasuk dinamika pengawasan obat dan makanan yang terus berkembang di tengah globalisasi. Peredaran produk obat dan makanan terus berputar dari kota besar hingga pelosok daerah antar pulau.

Kondisi geografis ini membuat

keberadaan BPOM di suatu daerah menjadi sangat krusial untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dikonsumsi masyarakat. Karena itu, keberadaan BPOM terus diperkuat dengan adanya unit pelaksana teknis (UPT) BPOM yang tersebar di seluruh Indonesia. Sejak tahun 2018, UPT BPOM hadir tidak hanya di 33 provinsi, tetapi juga di 40 kabupaten/kota hingga daerah 3T (Terdepan, Terpendil, dan Tertinggal). Kini BPOM telah memiliki total 76 UPT yang tersebar di 37 provinsi. UPT ini terbagi atas 3 klasifikasi, yaitu 21 Balai Besar POM (setingkat eselon II), 21 Balai POM (setingkat eselon III), dan 34 Loka POM (setingkat eselon IV).

Cerita dari Ujung Negeri

Salah satu cerita menarik datang dari Pos POM di Sumba Timur yang terbentuk pada 2019 dan kini telah menjadi Loka POM. Kepala Loka POM di Kabupaten Sumba Timur, Bernardus Beda Moron menceritakan pentingnya keberadaan UPT BPOM di Sumba Timur. "Pulau Sumba merupakan pulau tersendiri yang memiliki penduduk banyak karena mencakup empat kabupaten, dan masyarakatnya tinggal di pedalaman sehingga masih belum tersentuh pengawasan obat dan makanan dari BPOM," certanya.

Aksesnya yang terbilang sulit pun menjadi alasan utama hadirnya Loka



Petugas Loka POM di Kota Dumai menyeberangi pulau untuk mengawasi distribusi vaksin COVID-19 di Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu pulau terluar yang berbatasan dengan Malaysia.

POM di Kabupaten Sumba Timur. Terlebih di sini masih banyak ditemukan produk yang masuk ke Sumba terutama obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat. Selain itu masih banyak obat keras beredar di kios-kios karena minimnya edukasi masyarakat. Ada 2 pelabuhan yaitu di Waingapu dan di Sumba Barat Daya sebagai pintu masuk obat keras yang datangnya dari Bima dan Surabaya.

"Pulau Sumba ini terpisah jauh di mana jarak tempuh dari Kupang ke Sumba dengan pesawat satu jam lebih, kalau pakai kapal dua hari satu malam dengan jadwal seminggu hanya dua

kali, sehingga ada ide untuk membentuk Pos POM di Sumba Timur. Kami mulai melakukan koordinasi dengan Bupati Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Barat Daya. Satu pulau ini ada empat kabupaten. Topologi wilayahnya ini pegunungan dan jurang, untuk sampai ke pelosok kami pinjam mobil dari pemda," ceritanya mengenang masa awal pembentukan Pos POM Sumba Timur.

Kesaksian serupa disampaikan Kepala Balai POM di Palopo, Burham Sidobejo kepada Redaksi MaPOM. Dia mengungkapkan tantangan timnya dalam mengawasi obat dan makanan di pasaran. "Di beberapa wilayah, masih

ditemukan adanya pangan kedaluwarsa yang disebabkan karena kurangnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengelolaan pangan dalam perdagangan. Juga masih ditemukan peredaran kosmetik racikan, kosmetik kemasan dan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya," jelasnya.

Berayukur, Loka POM di Kota Palopo yang berdiri sejak 2019, pada 24 Oktober 2023 resmi naik status menjadi Balai POM di Palopo setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kementerian PANRB. Sejak saat itu Balai POM di Palopo menjadi UPT Badan POM yang mandiri. Balai POM di Palopo memiliki wilayah kerja meliputi tujuh kabupaten/kota yaitu Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja, Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Enrekang yang luasnya hampir setengah dari luas Provinsi Sulawesi Selatan.

"Dengan jumlah penduduk dan sarana pengawasan obat dan makanan yang tentu sangat banyak dan secara geografis letaknya berisian dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah, maka memang selayaknya mendapatkan peningkatan kelas UPT, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat agar mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan bermutu," terang Burham Sidobejo.

Jalan Panjang Penguatan UPT BPOM

Kompleksitas tantangan pengawasan obat dan makanan di Indonesia menuntut adanya penguatan kapasitas UPT BPOM. Dalam menjawab berbagai tantangan tersebut, UPT BPOM di daerah terus diperkuat melalui penataan kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja pengawasan di daerah. Penataan mempertimbangkan kemudahan jangkauan jarak dan waktu pengawasan, pemerataan beban kerja antar UPT dalam satu provinsi, dan kemudahan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BPOM terus mengepaskan sayapnya untuk menjangkau pengawasan hingga pelosok negeri. Selain demi perlindungan kesehatan masyarakat, BPOM hadir di berbagai daerah untuk memberikan pelayanan publik lebih optimal.

Tidak mudah, jalan panjang harus dilalui untuk membentuk UPT BPOM. Proses evaluasi kelembagaan membutuhkan waktu yang cukup lama yakni selama tiga tahun

Peningkatan Kelas UPT Loka POM menjadi Balai POM

Loka POM di Kota Payakumbuh	Balai POM di Payakumbuh
Loka POM di Kabupaten Tangerang	Balai POM di Tangerang
Loka POM di Kota Tasikmalaya	Balai POM di Tasikmalaya
Loka POM di Kabupaten Bogor	Balai POM di Bogor
Loka POM di Kota Surakarta	Balai POM di Surakarta
Loka POM di Kabupaten Kediri	Balai POM di Kediri
Loka POM di Kabupaten Jember	Balai POM di Jember
Loka POM di Kota Palopo	Balai POM di Palopo

Pembentukan UPT Loka POM

Pos POM di Aruk	Loka POM di Kabupaten Sambas
Pos POM di Atambua	Loka POM di Kabupaten Belu
Pos POM di Sumba Timur	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur



Petugas BPOM di Pekanbaru melakukan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional di Kabupaten Pelaiwan, Riau.

terakhir. Mulai dari evaluasi menggunakan instrumen kriteria klasifikasi UPT BPOM. Kemudian disampaikan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2020. Hingga akhirnya terbitlah izin prinsip dari Menteri PANRB pada 11 Mei 2023.

"Alhamdulillah, tahun ini Menteri PANRB telah menyetujui peningkatan klasifikasi 11 UPT BPOM. Sebanyak delapan Loka POM setingkat eselon I menjadi Balai POM setingkat eselon III. Selain itu, tiga Loka POM baru dibentuk dari Pos POM," ucap Kepala BPOM 2016-2023, Penny K. Lukito saat memberikan sambutannya pada peresmian delapan Balai POM dan tiga

Loka POM di Pendopo Panjalu Jayati di Kediri, Jawa Timur, Oktober 2023.

Kolaborasi Pengawasan

Peran serta lintas sektor menjadi kunci penting terwujudnya pengawasan obat dan makanan yang optimal. Karena itu, BPOM tidak bisa bekerja sendiri. Dalam setiap kesempatan, sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus didorong untuk bekerja sama mengoptimalkan pengawasan di daerah. Kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan media juga diperlukan untuk mewujudkan obat dan makanan aman.

Adanya pembentukan Loka

POM baru yang berkedudukan di tingkat kabupaten/kota diharapkan semakin mendekatkan BPOM dengan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, mempererat jalinan kolaborasi bersama lintas sektor di daerah, sehingga mampu memberikan perlindungan yang maksimal dengan jaminan produk yang aman dan bermutu. Pembentukan Loka POM juga bertujuan mendorong perekonomian melalui dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di daerah.

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana menyampaikan adanya Balai POM di Kediri yang akan membawahi beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur diharapkan dapat mendukung UMKM yang jumlahnya cukup banyak dan menjadi pahlawan pendapatan asli daerah. "Dengan adanya Balai POM Kediri semoga nantinya juga diikuti dengan banyaknya pelaku UMKM yang mendaftarkan produknya ke BPOM," katanya.

Melalui kolaborasi ini, BPOM bersama lintas sektor akan semakin kokoh menghadapi tantangan pengawasan obat dan makanan. Tak sampai di sini, peran UPT BPOM terutama yang baru saja diresmikan juga harus dibekali amunisi fasilitas pelayanan publik dan laboratorium pengujian yang mumpuni, serta anggaran yang memadai untuk akselerasi kinerja pengawasan obat dan makanan di daerah. Dengan demikian masyarakat terlindungi, mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu. ■





Penulis : Irfan Mustopa
Editor : Fathun Nur Hamidi

REN 2023: Evaluasi Mendorong Resolusi Pengawasan Obat dan Makanan Berkelanjutan

Evaluasi kinerja merupakan suatu proses yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana tujuan organisasi pemerintah sudah tercapai. Berbagai pendekatan dan formula terus berkembang untuk memperoleh hasil evaluasi yang akurat dan komprehensif.

Sejatinya BPOM melakukan evaluasi kinerja secara berkala setiap triwulan. Hal ini penting untuk menjaga arah kebijakan pengawasan obat dan makanan tetap *on the track* sesuai visi BPOM yakni, "Obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Komite Studi Nasional tentang Evaluasi (National Study Committee on Evaluation) dari University of California, Los Angeles, menyatakan evaluasi merupakan suatu proses pemilihan, pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang sesuai untuk mengetahui sejauh mana suatu tujuan program, prosedur, produk atau strategi yang dijalankan telah tercapai, sehingga bermanfaat bagi pengambilan keputusan serta dapat menentukan beberapa alternatif keputusan untuk program selanjutnya.

Bagaimana Rapat Evaluasi BPOM menjawab tantangan pengawasan obat dan makanan aman berkelanjutan?

Rapat Evaluasi Nasional 2023

Evaluasi akbar BPOM berskala nasional dilaksanakan secara rutin setiap tahun bertajuk Rapat Evaluasi Nasional (REN). Dalam acara ini, seluruh pimpinan unit pelaksana teknis (UPT) yang terdiri dari 21 Kepala Balai Besar POM, 21 Kepala Balai POM dan 34 Kepala Loka POM dari penjuru Indonesia duduk bersama dengan seluruh pimpinan unit kerja pusat (UKP) untuk membahas refleksi kinerja sekaligus kendala yang



Pdt. Kepala BPOM, L. Rizka Andalusia memberikan arahan pada REN BPOM Tahun 2023, Yogyakarta (30/11/2023).

dihadapi dalam pengawasan obat dan makanan serta rencana tindak lanjut ke depan.

Pada tahun 2023, kota Yogyakarta dipilih sebagai lokasi pertemuan tersebut. Pada hari pertama, para pimpinan menaruh perhatian penuh pada capaian kinerja dari seluruh satuan kerja (satker) yang ada di BPOM. Hal ini sekaligus memantik internal BPOM untuk larut dalam diskusi panjang. Narasumber dari Kementerian Keuangan dan Bappenas turut hadir untuk memperkaya perspektif dan berbagi gagasan untuk mendorong kemajuan pengawasan obat dan makanan.

Dalam arahannya, Pdt. Kepala BPOM, L. Rizka Andalusia menggarisbawahi perlunya inovasi pelaksanaan *sampling*.

Penetapan metode *sampling* yang tepat sangat penting untuk menggambarkan kondisi peredaran obat dan makanan.

Selain itu, masih terdapat beberapa hasil evaluasi yang perlu diperhatikan BPOM di antaranya penyederhanaan bisnis proses, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, serta pemanfaatan *artificial intelligence* (AI) untuk membantu proses bisnis BPOM berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

"BPOM perlu terus berkomitmen membangun kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan yang efektif," ujar Pdt. Kepala BPOM. Pesan ini sesuai dengan tema REN 2023 yakni Semangat Kolaborasi, Mewujudkan Pengawasan Obat dan Makanan



yang Berintegritas Menuju Indonesia Maju. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan sangat penting untuk menghadapi tantangan pengawasan obat dan makanan yang terus berkembang seiring globalisasi, perdagangan bebas, kemajuan teknologi, hingga perubahan gaya hidup konsumen.

Sementara itu, Sekretaris Utama BPOM, Rita Mahyona, menyampaikan capaian realisasi anggaran BPOM per 30 November 2023 yaitu sebesar 86,81% dari pagu sebesar Rp2.196 triliun. Realisasi ini di atas rata-rata nasional dan menempati peringkat 12 dari 84 kementerian/lembaga (rata-rata realisasi anggaran nasional sebesar 81,19%).

"Capaian ini jangan membuat kita cepat puas. Dengan sisa waktu yang sangat terbatas, BPOM tetap harus terus mengoptimalkan capaian program kinerja dan anggaran," tegasnya.

Dalam rapat evaluasi kali ini, Plt. Kepala BPOM turut memberikan apresiasi bagi lingkup internal BPOM melalui penganugerahan unit kerja terbaik dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP), Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN), dan Pelayanan Publik. Apresiasi lain yang menjadi inti rapat evaluasi adalah unit kerja dengan realisasi anggaran tertinggi dipegang oleh Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik pada klaster pusat dan BPOM di Bengkulu pada klaster unit pelaksana teknis.

Pesan Penting 2024

Tahun 2024 sudah di depan mata. Seluruh jajaran BPOM bersiap menyongsong tahun baru dengan penuh semangat. Apa lagi DIPA yang diperoleh BPOM tahun 2024 sebesar Rp2,364 triliun, meningkat 6,24% dibandingkan DIPA BPOM tahun 2023. Plt. Kepala BPOM menyampaikan amanat Presiden pada saat penyerahan DIPA tahun 2024 bahwa anggaran yang telah diberikan agar dapat digunakan secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran.

Dalam forum ini juga dilakukan pembahasan terkait program kerja strategis ke depan. Kementerian PPN/ Bappenas menyarankan BPOM untuk merumuskan indikator yang lebih menantang pada RPJMN dan Renstra

HASIL EVALUASI KINERJA 2023



1

Perlu peningkatan kemandirian nasional dalam penyediaan bahan baku obat dan obat alam untuk meningkatkan daya saing produk dan mengurangi ketergantungan impor, dengan tetap mengutamakan kualitas dan keamanan bahan baku obat dan obat alam;



2

Perlu penetapan metode sampling yang tepat untuk menggambarkan kondisi peredaran obat dan makanan di masyarakat, termasuk validasi tahunan terhadap metode sampling karena perkembangan sebaran dan ragam produk obat dan makanan;



3

Perlu pengukuran dampak jangka panjang berbagai program yang sudah dilaksanakan diantaranya peningkatan daya saing UMKM setelah melalui pendampingan BPOM, penurunan kasus keracunan pangan, dan efektivitas KGE obat dan makanan;



4

Perlu peningkatan penggunaan *machine learning* atau *big data analytics* dalam analisis kejahatan obat dan makanan serta pemetaan kerawanan kejahatan untuk meningkatkan ketepatan analisis dan identifikasi pola kejahatan yang kompleks;



5

Perlu peningkatan kualitas penyidikan di bidang obat dan makanan melalui kolaborasi bersama Polri dalam pembentukan PPNS untuk memperkuat penanganan kasus kejahatan terkait obat dan makanan.

“

Setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat sehingga harus fokus pada hasil dan bermanfaat maksimal bagi rakyat.

Plt. Kepala BPOM, L Rizka Andalusia

”

periode mendatang. Ini sangat penting untuk mengukur dampak pengawasan obat dan makanan bagi masyarakat.

"Upayakan ada indikator yang mengukur dampak pengawasan obat dan makanan di masyarakat. Misalnya tentang kejadian luar biasa keamanan pangan, kejadian tidak diinginkan terkait sediaan farmasi, dan semacamnya." Saran Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/ Bappenas, Amloh Alhumami.

Selain dari Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Keuangan hadir

menyosialisasikan kebijakan baru yaitu PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Dengan berfaknya peraturan tersebut maka mekanisme perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi anggaran dapat berjalan lebih efisien karena telah dilakukan integrasi data antara 3 aplikasi yaitu aplikasi KRISNA milik Bappenas serta aplikasi SAKTI dan SMART milik Kementerian Keuangan.

Selain itu, di dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa penilaian kinerja anggaran kementerian/lembaga terdiri dari 2 unsur yaitu Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran yang dipantau oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta Evaluasi Kinerja dan Anggaran yang dipantau oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Masih dalam rangkaian Rapat Evaluasi Nasional BPOM 2023, penerapan manajemen mutu (Quality Management System/QMS) juga dibahas dalam forum tersebut. Plt. Kepala BPOM



Penyerahan DiPA Satuan Kerja di lingkungan BPOM, Yogyakarta (30/11/2023).

menyampaikan penerapan QMS BPOM sudah sangat baik, namun masih perlu peningkatan pada komitmen perbaikan berkelanjutan, khususnya di UPT BPOM. Hal yang tidak boleh dilupakan yaitu komitmen perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) harus sesuai prinsip ISO 9001:2015.

Penerapan QMS akan dievaluasi sesuai perkembangan organisasi dan sumber daya yang dimiliki. Sistem manajemen yang sederhana dan terintegrasi (*integrated management system*) perlu terus dibangun agar menjadi lebih implementatif, efisien, dan efektif.

Resolusi Pengawasan Berkelanjutan

Menurut, William A. Mehrens dan Irin J. Lehmann, evaluasi sebagai proses sistematis dan berkelanjutan untuk menyajikan informasi tentang suatu program sebagai dasar membuat keputusan. Fungsi utama evaluasi adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Sejalan dengan itu, Plt. Kepala BPOM menaruh banyak garis bawah untuk resolusi keberlanjutan pengawasan BPOM, agar ditindaklanjuti dan menjadi

perhatian bersama. Pertama, program prioritas BPOM 2024 sesuai dengan arah kebijakan BPOM 2024 perlu didukung dengan anggaran yang cukup. Kedua, perlu adanya sinkronisasi perencanaan antar unit kerja untuk mendukung program prioritas BPOM 2024.

Ketiga, *plan of action* (PoA) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) agar disusun dengan lebih presisi dan dijadikan panduan dalam pelaksanaan kegiatan. Keempat, penyusunan anggaran agar lebih terstruktur untuk memastikan kegiatan yang direncanakan mendukung keberhasilan program strategis. Kelima, perlu dilakukan *reviu* dan evaluasi atas capaian kinerja dan monitoring rencana tindak lanjut secara berkala, baik pada level unit kerja maupun satuan kerja. Terakhir, peningkatan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam mencapai target yang ditetapkan.

Hasil evaluasi tersebut perlu dicermati bersama, Rapat Evaluasi Nasional bukan sekedar menjadi wadah introspeksi melainkan 'gudang' merakit resolusi. Betapa pentingnya evaluasi sebelum resolusi merupakan buah hasil dari forum serupa. Sebagai penutup, Plt. Kepala BPOM mengajak seluruh civitas BPOM agar terus berupaya meningkatkan kinerja lebih efektif dalam melindungi masyarakat dan mendorong daya saing bangsa melalui inovasi pengawasan obat dan makanan aman dan berkelanjutan. ■



Jajaran Pimpinan UKP dan UPT mengikuti REN BPOM Tahun 2023, Yogyakarta (30/11/2023)



4 Hal yang Harus Diperhatikan

**Sebelum Memberikan
Kosmetik pada Anak**

Penggunaan mainan kosmetik oleh anak-anak, marak terjadi di dunia termasuk di Indonesia. Anak-anak yang masih memerlukan ruang untuk eksplorasi kreativitas perlu difasilitasi dan diawasi di saat yang bersamaan.

Berikut adalah 4 hal yang perlu diperhatikan

Sebelum memberikan
kosmetik pada anak.



01 Pilih yang Terverifikasi di BPOM

Di pasaran terdapat 2 jenis
mainan kosmetik, yaitu:



Terverifikasi BPOM

Kosmetik dengan bentuk dan kemasan untuk anak-anak yang telah terverifikasi BPOM dapat digunakan seperti kosmetik pada umumnya



Mainan Kosmetik ber-SNI

Tidak boleh digunakan pada kulit manusia/binatang, hanya boleh digunakan pada boneka

02 Perhatikan Peringatan dan Cara Penggunaan

- ✓ Batasan usia
- ✓ Berisi komponen/partikel kecil yang berisiko tertelan/tersedak
- ✓ Petunjuk pemakaian/penggunaan
- ✓ Apabila terjadi reaksi alergi segera bersihkan



03 Gunakan di Bawah Pengawasan Orang Tua

Kosmetik seperti *make-up kit* yang berisi *eye-shadow*, *blush-on*, dan lain-lain dapat mengandung partikel kecil serta berpotensi ditelan/dimasukkan ke mulut oleh anak-anak saat digunakan sehingga memerlukan pengawasan penuh oleh orang tua.

Selain itu, beberapa anak memiliki kulit yang lebih sensitif dibandingkan orang dewasa sehingga perlu dilakukan pemantauan efek samping yang terjadi setelah penggunaan kosmetik.

04 Hindari Produk Berbahaya

Hindari produk mainan kosmetik yang tidak memiliki SNI dan nomor notifikasi dari BPOM





Penulis : Yansar Rahman
Editor : Fathian Nur Hamid

Saka POM Nasional Disahkan Jutaan Kader Pramuka Akan Perkuat Pengawasan di Seluruh Indonesia



Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Rita Endang memberikan paparan "Saka Pengawasan Obat dan Makanan" pada Musnah XI Gerakan Pramuka di Balai Meuseuraya Aceh (BMA), (02/12/2023).

Pendidikan Saka POM bukan sekadar membentuk relawan, tetapi juga mencetak generasi Pramuka Penegak dan Pandega yang profesional, edukatif, dan berperan sebagai wirausahawan di sektor pengawasan obat dan makanan.

Indonesia dengan kondisi geografisnya yang unik menghadapi tantangan serius dalam pengawasan obat dan makanan. Sebagai negara kepulauan, negeri ini rentan terhadap penyelundupan produk ilegal melalui jalur tikus di perbatasan yang terbuka. Ditambah lagi perkembangan globalisasi disertai pesatnya kemajuan teknologi dan informasi membuka celah peredaran obat yang tak terkendali. Fenomena ini perlu direspon cepat sebagai tantangan baru dalam pengawasan obat dan makanan yang semakin kompleks di masa depan.

Sebagai respon terhadap kompleksitas ini, BPOM telah menjalin kemitraan strategis dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka sejak 2017. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Rita Endang menyebut pihaknya siap mengerahkan ribuan SDM BPOM untuk membantu perkembangan Saka POM kedepannya sebagai instruktur dan/atau pamong Saka POM.

“Sebanyak 5.205 sumber daya manusia (SDM) BPOM, 4.838 kader/fasilitator obat dan makanan, serta 190 kader dan fasilitator dari Pramuka dari 21 Balai Besar POM, 21 Balai POM, dan 34 Loka POM di Indonesia siap untuk mendukung persiapan sarana, prasarana, dan SDM demi terwujudnya Saka POM. - Rita Endang -

Kolaborasi ini melahirkan Satuan Karya Pramuka Rintisan Pengawasan Obat dan Makanan (Saka Rintisan POM) yang terdiri dari tiga Krida, yakni Pengujian Sederhana, Pemantauan Obat dan Makanan, serta Informasi Obat dan Makanan. Pendidikan Saka POM diharapkan membentuk Pramuka Penegak dan Pandega sebagai sukarelawan, profesional, edukator, dan wirausahawan di bidang

obat dan makanan.

Setiap krida memiliki tugas dan kemampuan khusus. Krida Pengujian Sederhana Obat dan Makanan, BPOM melatih kader Pramuka menggunakan *rapid test kit* pengujian bahan berbahaya pada pangan (formalin, boraks, rhodamin B, *methanyl yellow*) serta pengujian mikrobiologi sederhana. Sedangkan Krida Pemantauan Obat dan Makanan, BPOM mengembangkan "Aplikasi Pramuka Sapa" berbasis android untuk pelaporan produk pangan olahan yang ditemukan rusak, kedaluwarsa atau tanpa izin edar. Anggota Pramuka juga dapat melakukan pemantauan informasi obat dan makanan melalui aplikasi BPOM Mobile, website, maupun media sosial BPOM.

Selain itu, dalam kegiatan bersama BPOM memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada anggota pramuka pada penyelenggaraan perkemahan dan Jambore Pramuka atau kegiatan lain, terkait obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan bermutu dalam berbagai dialog yang produktif.

Para Anggota Saka POM yang sudah memiliki keterampilan tiga Krida tersebut diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang pengawasan obat dan makanan kepada para anggota Pramuka di gugus depannya masing-masing. Selain itu memiliki sikap, perilaku yang baik, memiliki rasa cinta dan jiwa berbakti yang berguna bagi bangsa serta memiliki cara berpikir yang berdaya guna mencegah pelanggaran di bidang obat dan makanan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Hingga Desember 2023, Saka POM berhasil mencapai 30% target mengisi pos-pos di tingkat Kwarda dan Kwardab. Karena itu Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dengan bangga mengesahkan Saka Rintisan POM menjadi Saka Nasional pada Musyawarah Nasional (Munas) XI Gerakan Pramuka yang dihelat di Kota Serambi Mekkah. Momentum ini sekaligus menandai kesuksesan dan peningkatan kehadiran Saka POM di seluruh Indonesia.

Pengesahan Saka Nasional pada Munas Gerakan Pramuka ini sangat penting sebagai legal basis untuk implementasi yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Perluasan pembinaan dan pengelolaan Saka POM secara nasional, Saka POM akan menjadi kontribusi positif pada pembangunan nasional, termasuk juga pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Menurut data Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kwartir Nasional (Kwarnas) tahun 2020, jumlah anggota Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia sebanyak 26,2 juta orang. Tercatat lebih dari 6,7 juta kader Pramuka Penegak dan Pandega yang berpotensi menjadi relawan Saka POM sebagai kader pembangunan dan pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia. Para kader pengawasan obat dan makanan itu tersebar dalam 31 Saka POM di tingkat Kwartir Daerah serta 181 di tingkat Kwartir Cabang. Saka POM menjadi salah satu inisiatif yang menggambarkan komitmen nyata dalam melakukan pembinaan dan juga menjaga kualitas hidup masyarakat Indonesia yang lebih merata ke seluruh negeri.

Perkuat Fundamental Gerakan Pramuka

Mundur beberapa bulan sebelum pengukuhan Saka Rintisan POM menjadi Saka Nasional, BPOM terus berkoordinasi dengan Kwarnas Gerakan Pramuka untuk melakukan pelatihan orientasi kepramukaan bagi calon majelis pembimbing, calon pimpinan, calon pemang, dan calon instruktur Saka Rintisan POM beserta dengan perangkatnya. Sebanyak 333 peserta Orientasi Kepramukaan Tim Pengelola Saka POM Tahun 2023 terdiri dari perwakilan calon instruktur dan calon pemang saka di unit pusat dan Balai

Besar/ Balai/ Loka POM di seluruh Indonesia.

Para peserta orientasi dibekali dengan materi terkait fundamental gerakan pramuka oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Tingkat Nasional (Pusdiklatnas) Kwarnas Gerakan Pramuka. Lalu materi pengalaman prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Para peserta juga dibekali pemberian materi peran tugas dan fungsi anggota dewasa gerakan pramuka, terkait kebijakan Kwarnas gerakan spiritual, emosional, intelektual, fisik, dan sosial (SESOSIF) dan pembinaan Saka Pramuka.

Pelatihan orientasi tersebut diselenggarakan dalam rangka

lulusan pembinaan anggota.

3. Dukungan Sarana Prasarana dan Pendanaan:

Sarana prasarana serta pendanaan kegiatan Saka POM menjadi perhatian utama dalam memastikan keberlanjutan program ini.

4. Pengembangan Produk dan Kewirausahaan:

Kemitraan ini juga membuka peluang untuk pengembangan produk dan kewirausahaan di sektor obat dan makanan. Dengan telah disahkannya Saka Rintisan POM menjadi Saka Nasional, BPOM berharap semakin banyak kader Pramuka secara aktif ikut berperan dalam pengawasan obat dan makanan.



pemenuhan persyaratan pengesahan Saka Rintisan POM menjadi Saka Nasional. Langkah ini diharapkan dapat memperluas cakupan dan pembinaan di bidang pengawasan obat dan makanan kepada Pramuka Penegak Pandega di seluruh penjuru negeri.

Kemitraan Pramuka dan BPOM: Sebuah Langkah Maju

BPOM memiliki unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh Indonesia, yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran Saka POM. Berbagai kegiatan dapat dilakukan dalam kerja sama ini, antara lain:

1. Pembentukan Pangkalan Saka POM:

Langkah pertama dalam memperkuat keterlibatan pramuka adalah dengan membentuk pangkalan Saka POM di berbagai daerah.

2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan:

BPOM mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Saka POM, termasuk uji kompetensi, praktik lapangan, dan pemanfaatan

Kader Pramuka juga harus memiliki wawasan yang terbaru, pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan keakapian dalam bidang pengawasan obat dan makanan, khususnya tentang tiga krida dalam Saka POM.

Keterlibatan Pramuka Penegak dan Pandega dalam program pengawasan obat dan makanan sejalan dengan sistem pendidikan kepramukaan. Para kader pramuka memiliki peran penting untuk terlibat dalam masalah-masalah kemasyarakatan dan kebangsaan, termasuk di sektor obat dan makanan.

Pengawasan obat dan makanan bukan hanya tentang menegakkan peraturan, tetapi juga tentang mengajarkan nilai-nilai kepedulian, keamanan, dan kualitas hidup. Melalui kemitraan ini, Gerakan Pramuka membuktikan bahwa generasi muda Indonesia bukan hanya menjadi saksi, tetapi juga agen perubahan dalam menjaga kesehatan, keamanan, dan kualitas produk obat dan makanan di Indonesia. ■



Penulis : Mauli Muhammad Adib
Editor : Fathan Nur Hamidi

Kreatif dan Tertib dalam Beriklan Kolaborasi Mahasiswa dengan UMKM Pangan Olahan

Pernah lihat iklan di media sosial yang membuat kita terpingkal-pingkal? Atau iklan dengan visual yang ciamik seperti di televisi? Atau malah iklan yang mengundang perasaan emosional ala iklan Thailand?



Para pemenang Lomba Kolaborasi Membuat Iklan Memenuhi Ketentuan (KOMIK) yang diikuti mahasiswa perguruan tinggi di Jabodetabek, (22/11/2023).

Iklan merupakan salah satu cara meningkatkan daya tarik suatu produk kepada calon konsumen. Melalui iklan, pelaku usaha dapat berkomunikasi dengan konsumen mengenai suatu produk. Tujuannya adalah memengaruhi calon konsumen untuk tahu, kenal, dan pada akhirnya membeli produk tersebut.

Sejak media sosial berkembang, iklan tidak harus mahal. Kini, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pun dapat beriklan, tak terkecuali UMKM pangan olahan. Hal yang umumnya dilakukan pelaku UMKM dalam beriklan biasanya dengan membuat akun Instagram dan posting terkait produknya, berupa poster, foto produk, maupun video.

Dengan kemudahan tersebut, ada tantangan baru yang muncul, seperti adanya temuan iklan tidak memenuhi ketentuan (TMK) dari UMKM. Untuk itu BPOM sebagai regulator obat dan makanan harus memastikan bahwa pelaku usaha dalam beriklan harus benar, jujur, dan bertanggung jawab.

BPOM sebagai unsur pemerintah menggandeng pelaku usaha dan masyarakat untuk terlibat dalam sistem pengawasan pangan olahan, salah satunya melalui kegiatan Kolaborasi Membuat Iklan Memenuhi Ketentuan (KOMIK) yang telah diselenggarakan sejak 2019.

Menurut Ptt. Direktur Pengawasan

Peredaran Pangan Olahan, Didik Joko Pursito, KOMIK bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pangan melalui sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

"Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan mampu menurunkan persentase iklan TMK di peredaran menurun dan mampu membangun perekonomian nasional melalui peningkatan daya saing produk UMKM," ujar Didik pada Pengumuman Juara Lomba KOMIK di Bogor, November 2023.

Rangkaian kegiatan KOMIK 2023 dimulai pada Juli 2023, yaitu pendaftaran dan seleksi. Setelah proses seleksi, terpilih 30 mahasiswa yang berasal

dari perguruan tinggi di Jabodetabek meliputi Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Sahid, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Sedangkan dari pelaku usaha terpilih 10 UMKM di wilayah Jakarta dan Bogor.

Peserta yang lolos, baik mahasiswa maupun UMKM diberikan pembekalan berupa bimbingan teknis pengamatan iklan pangan dan pelatihan pembuatan konten. Peserta diberikan pengetahuan mengenai peraturan iklan pangan olahan, komunikasi dalam iklan, kreativitas dalam pembuatan konten iklan, dan cara pembuatan iklan. Selain itu, peserta juga melakukan praktik pengamatan iklan dan pelaporan melalui menu LAPOR Iklan pada aplikasi BPOM Mobile.

Setelah mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan, mahasiswa diberikan waktu kurang lebih selama satu bulan untuk menyusun karya iklan pangan olahan berupa poster dan video yang berkolaborasi dengan UMKM. Penilaian dilakukan oleh juri yang berasal dari pakar periklanan; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Koperasi dan UMK; dan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan BPOM.

Berdasarkan hasil penilaian, juara 1 dimenangkan oleh Tim Nutrinoms dari Universitas Indonesia bersama Bidabeda,

juara 2 dimenangkan oleh Tim Ade dari IPB bersama Eldhels Ho-Ky Food, juara 3 Tim Sehati Pangan dari IPB bersama Ding Dong Food, dan juara favorit Tim Content Craft dari Universitas Sahid bersama Babasnacks.

Salah satu peserta KOMIK dari Tim Nutrinoms, Vincent Marcell (Universitas Indonesia) mengungkapkan pengalaman mengikuti KOMIK merupakan suatu hal baru yang positif. Sementara pemilik UMKM Bidabeda, Ida Nuraida menyampaikan kegiatan ini membuka wawasan. "Materi tentang iklan yang wajib memenuhi kriteria sangat bermanfaat. Selain itu, pembuatan video menambah ilmu terkait *lighting*, *public speaking*, intonasi percakapan, dan kata-kata yang tepat untuk iklan. Sangat seru bekerja sama dengan mahasiswa," tuturnya.

Senada dengan Ida, Sri Yulianti pemilik UMKM Eldhels Ho-Ky Food, mengapresiasi kegiatan lomba KOMIK karena mempertemukan pelaku usaha dengan mahasiswa. "Pelaku UMKM biasanya lebih berfokus dengan produksi. Dengan adanya KOMIK, mahasiswa bisa langsung menerapkan materi yang diajarkan. Saya sudah dibantu dibuatkan video profile oleh tim dari IPB," ujarnya.

Lebih lanjut, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Rita Endang menyampaikan terima kasih atas

dukungan serta kerja sama berbagai pihak sehingga kegiatan KOMIK dapat terselenggara dengan baik. "Apresiasi kami sampaikan kepada pakar iklan, Kemendikbud, Kemenkop UKM, serta Direktorat Standardisasi Pangan Olahan BPOM. Terima kasih juga kepada perguruan tinggi yang telah memfasilitasi mahasiswanya dalam mengikuti kegiatan KOMIK," ungkapnya.

Rita menegaskan komitmen BPOM untuk senantiasa mengawal keamanan pangan dan melindungi kesehatan masyarakat. Pelaku usaha pangan diharapkan berkomitmen selalu memenuhi ketentuan dalam produksi pangan, pelabelan, dan periklanan. "Saya juga berpesan agar masyarakat menjadi konsumen cerdas dalam memilih pangan aman. Ingat Cek KLIK, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluwarsa sebelum membeli atau mengonsumsi pangan olahan, serta mengecek kebenaran dari setiap informasi yang diperoleh. Ingat, bukan kata orang, pastikan Kata BPOM," tutup Rita. ■



“

Dari kegiatan KOMIK ini, kami semakin memahami peraturan periklanan dapat memberikan dampak yang lebih baik. Mereka tidak akan terjebak dengan iklan yang berlebihan atau jebakan lainnya

- Peserta Lomba KOMIK, Vincent Marcell, Universitas Indonesia -

”

Daftar Pemenang KOMIK

Juara 1:

- Nutrinoms (Vincent Rafferty Marcellin, Elsyifa Bareziq Syafaria Mulla, dan Hana Maulani Putra) --> UI
- UMKM Bidabeda (Ida Nuraida)

Juara 2:

- ADE (Argasepta Armadhani, Asrabulla, dan Dinda Ramadhani Ermaistyaningsih) --> IPB Univ
- UMKM Eldhels Ho-Ky Food (Sri Yulianti)

Juara 3:

- Sehati Pangan (Hendrawan Saputra, Salwa Rizqia, dan Nur Rohman) --> IPB Univ
- UMKM Ding Dong Food (Ibnu Banyu Ardi)

Juara Favorit:

- Content Craft (Raden Galen dan Joshinta Malik) --> Univ Sahid
- UMKM Babasnacks (Ummul Bahin)



Penulis : Zelin Fadhillurrahman
Editor : Fathian Nur Hamidol

Generasi Zillennial: Sendi Indonesia Emas dalam Mendorong Kebiasaan Sehat di Masyarakat

Indonesia sedang menyiapkan cita-citanya untuk menyongsong Indonesia emas yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2045. Cita-cita tersebut ditopang oleh generasi zillennial. Di usia yang saat ini masih belia, mereka memegang peran kunci dalam membawa Indonesia menuju puncak kejayaan. Kebiasaan memilih makanan yang aman adalah hal yang perlu didorong dan dipersiapkan.



Petugas BPOM menjelaskan kepada Siswa/i SMA tentang proses pembuatan pangan olahan yang aman, bermutu, dan bergizi, Jakarta (12/01/2023).

Berbicara tentang Indonesia emas, kualitas sumber daya manusia dengan usia produktif adalah kunci bagi momentum ini. Pemenuhan gizi yang baik adalah hal yang perlu diperhatikan karena menjadi pondasi utama bagi kesehatan dan perkembangan manusia.

Ironinya Indonesia menghadapi tantangan gizi yang kompleks atau dikenal sebagai "triple burden of malnutrition". Fenomena ini mencakup tiga masalah utama yang melibatkan kelebihan gizi (obesitas), kekurangan gizi (*stunting*/kerdil, *wasting*/kurus,

kekurangan berat badan), dan kekurangan zat gizi mikro (vitamin dan mineral penting).

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) tahun 2018 menunjukkan 30,8% balita mengalami *stunting* dan 10,2% balita lainnya mengalami *wasting*. Di antara siswa usia sekolah, masalah gizi muncul karena banyaknya yang tidak sarapan (66%), kurang mengonsumsi sayur dan buah (97%), serta cenderung mengonsumsi makanan berisiko seperti makanan manis

(60%), makanan asin (32%), makanan instan (11%), serta makanan berpenyedap (78%). Pada kelompok usia 16-18 tahun, terdapat 6,7% yang kurus, 22,4% pendek, dan 9,6% gemuk. Sementara pada kelompok usia 13-15 tahun, 4,8% mengalami obesitas. Masih ada juga 32% siswa usia 16-24 tahun yang menderita anemia, dan sebagian besar dari mereka (98%) tidak cukup minum tablet tambah darah karena alasan seperti merasa tidak perlu (20%), lupa (19%), dan takut akan efek samping (9%).

Pemanfaatan Teknologi

Teknologi memainkan peran penting dalam membantu Indonesia keluar dari polemik kesehatan. Setidaknya ada dua peran teknologi dalam hal ini, yakni memudahkan pilihan dan meningkatkan kesadaran untuk memilih yang lebih baik. Teknologi dapat mendorong generasi muda untuk lebih cerdas.

"Teknologi dapat membantu kita mencari dan menentukan dengan mudah makanan yang aman dan bermutu. Contohnya kita dapat melihat di aplikasi ojek online, rating bintang yang menunjukkan banyaknya terjual, serta kita juga dapat melihat keamanan suatu produk melalui website BPOM," jawab Rina Sulista, seorang remaja usia 18 tahun ketika ditanya peran teknologi

untuk penyebaran informasi dalam wadah website maupun media sosial bisa jadi jauh lebih efektif untuk menjangkau setiap individu. Generasi zillenial yang sedari dini sudah akrab dengan teknologi memiliki kelebihan dalam mengakses pengetahuan sehingga meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan. Terlebih lagi jika informasi itu dimanfaatkan untuk menjadi agen penyebar informasi di dunia maya.

Hal tersebutlah yang menjadikan mereka memegang peran penting dalam upaya membentuk gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari di tengah masyarakat. Kombinasi antara generasi zillenial dengan penggunaan teknologi untuk peningkatan kesadaran adalah amunisi terbaik untuk mewujudkan mimpi Indonesia Emas 2045.

Berdayakan Generasi Zillenial

Potensi hanyalah potensi jika tidak diolah dengan baik. Karena itu BPOM memiliki peran sentral dalam menyiapkan generasi zillenial menjadi kader yang akan menyuarakan peningkatan kesadaran kesehatan terkait makanan yang beredar di masyarakat.

BPOM secara aktif dan komprehensif hadir melalui berbagai kegiatan edukasi yang sasarannya

semangat usia muda mulai terasa sejak mereka berjalan memasuki ruangan. Ragam pertanyaan seputar keamanan pangan dilontarkan dengan penuh antusias, ciri khas generasi muda.

"BPOM sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penjaminan keamanan pangan, mengajak generasi muda untuk ikut berpartisipasi mewujudkan budaya pangan aman dan menjadi *role model* bagi lingkungannya," jelas Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Rita Endang yang menjadi narasumber di acara tersebut.

Program lain yang dirancang untuk melibatkan generasi zillenial adalah Pangan Aman Goes to Campus. Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki peran penting dalam memengaruhi tren konsumsi makanan olahan yang lebih sehat. Tak hanya itu, mahasiswa juga bertindak sebagai fasilitator keamanan pangan bagi usaha mikro kecil (UMK) pangan olahan dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (OPPOB).

Pada program ini, generasi muda akan mengikuti pembelajaran mendalam, peningkatan kompetensi, dan penguatan pengalaman di sektor keamanan pangan. Melalui program ini juga generasi zillenial mendapat kesempatan unik untuk terlibat langsung dalam situasi praktis, memperkaya wawasan, dan meningkatkan kompetensi mereka dengan memberikan pendampingan kepada UMK di sektor pangan olahan.

BPOM tidak hanya mendampingi generasi zillenial dalam pembelajaran teoritis. Melainkan juga memberikan wadah nyata untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam mendukung praktik keamanan pangan di tingkat lokal.

Menjadi generasi cerdas, bukan sekadar menjadi konsumen yang bijak tetapi juga menjadi agen perubahan di masyarakat. Angan yang dicita-citakan ialah generasi zillenial yang berperan dalam mendorong kebiasaan sehat dengan menjadi teladan, setidaknya di lingkungan terdekat. Dan di kala itu, berbagai mimpi tentang Indonesia emas akan nyata kita lihat dengan akurat. ■



Siswa SMA yang sedang antusias memperhatikan penyampaian informasi tentang keamanan pangan dan Deputy Bidang Pengawasan Pangan BPOM, Jakarta (09/11/2023).

dalam memudahkan memilih makanan yang aman, bermutu, dan bergizi.

Peran teknologi dalam peningkatan kesadaran masyarakat patut diperhitungkan. Penggunaan teknologi

adalah generasi zillenial. Misalnya, pada November lalu, BPOM menyelenggarakan Gebyar Generasi Zillenial Keamanan Pangan Tahun 2023 yang dihadiri oleh siswa/i SMA. Gelora



Penulis : Eva Kartika
Editor : Fathian Nur Hamidi

Waspada Alergen pada Pangan Olahan Ayo Baca Label

Saat membeli pangan olahan, pernahkah melihat tulisan "Mengandung Alergen" pada label? Tulisan tersebut biasanya tercantum di dekat daftar bahan. Pencantuman keterangan alergen ini penting dilakukan pada label pangan olahan yang mengandung bahan tertentu dan dapat menyebabkan alergi setelah dikonsumsi. Beberapa orang memiliki alergi terhadap bahan pangan tertentu, sehingga wajib memperhatikan label pangan olahan.

HIERARKI RISIKO PADA ALERGI PANGAN

sumber: (Dubois et al., 2018)



Alergi pangan terjadi akibat reaksi sistem kekebalan tubuh individu (antibodi IgE) dengan protein pada pangan yang telah dikonsumsi. Reaksi ini dapat memunculkan berbagai gejala alergi yang bervariasi. Terdapat hierarki risiko yang dapat dialami oleh orang yang menderita alergi pangan. Dimulai dari tidak adanya gejala, gejala sangat ringan seperti gatal dan kesemutan, gejala ringan hingga sedang, hingga gejala berat yang mengancam nyawa, bahkan kematian.

Prevalensi alergi pada pangan tertinggi terjadi pada masa kanak-kanak dan insiden tertinggi terjadi selama tahun pertama kehidupan. Meskipun demikian, alergi pangan juga sering terjadi pada usia dewasa. Diperkirakan

kejadian alergi pada anak sebesar 5-8%. Sedangkan pada orang dewasa sebesar 1-2% (World Allergy Organization (WAO) : White Book on Allergy, 2013).

Lalu apa yang dimaksud dengan alergen? Alergen adalah bahan pangan atau senyawa yang menyebabkan alergi dan/atau intoleransi. Ketentuannya telah diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Keterangan tentang alergen wajib dicantumkan pada label pangan olahan yang mengandung alergen. Tak hanya itu, pangan olahan yang diproduksi menggunakan sarana produksi yang sama dengan pangan olahan yang mengandung alergen juga wajib mencantumkan keterangan serupa pada label.

Bahan Alergen Pangan

- Sereal mengandung gluten, yaitu gandum, rye, barley, oats, spelt atau strain hibrida - Telur - Ikan, krustase (udang, lobster, kepiting, tiram), moluska (kerang, bekicot, atau siput laut) - Kacang tanah (peanut), kedelai - Susu (termasuk laktosa)	- Kacang pohon (tree nuts) termasuk kacang kenari, almond, hazelnut, walnut, kacang pecan, kacang Brazil, kacang pistachio, kacang Macadamia atau kacang Queensland; kacang mede; dan - Sulfat dengan kandungan paling sedikit 10 mg/kg (sepuluh milligram per kilogram) dihitung sebagai SO₂ (dapat berupa belerang dioksida, natrium bisulfat, natrium metabisulfat, kalium sulfat, kalsium bisulfat, dan kalium bisulfat) untuk produk siap konsumsi.
--	--



Jenis-jenis Alergen



Contoh Keterangan tentang Alergen

Bahan Pangan Pemicu Alergi

Keterangan alergen memudahkan konsumen dalam mengetahui bahan alergen yang terkandung dalam pangan olahan yang akan dikonsumsi. Sayangnya tidak semua konsumen memerhatikan bahan yang terkandung dalam pangan olahan. Sebenarnya bahan apa saja yang termasuk alergen? Bahan alergen pada pangan olahan dapat berupa sereal, ikan, telur, susu, kacang-kacangan, dan sebagainya.

Namun demikian untuk bahan alergen yang telah mengalami proses pemurnian lebih lanjut (*highly refined food*) tidak wajib mencantumkan keterangan alergen pada label. Proses pemurnian tersebut dapat menghasilkan produk yang tidak mengandung protein atau mengandung protein dengan kadar yang sangat kecil, sehingga tidak menimbulkan reaksi alergi.

Bahan pangan dengan pemurnian lebih lanjut tidak perlu mencantumkan keterangan alergen

Produk sereal/ia antara lain sirup glukosa (termasuk dekstrosa), maltodekstrin, fruktosa, dan gula alkohol;
Produk perikanan dapat berupa gelatin, minyak ikan;
Produk kedelai dapat berupa minyak; lemak kedelai dan lesitin; RRR alpha tocopherol; alpha tocopherol; gamma tocopherol; alpha tocotrienol; 5,7,8-trimethyltocol; dan campuran tocopherol; dan
Produk susu dapat berupa laktitol, protein terhidrolisa sempurna.

Pelabelan Alergen Pada Pangan Olahan

Pangan Mengandung Bahan Alergen	Produksi Dengan Sarana yang Sama
- Mengandung alergen ... (lihat daftar bahan yang dicetak tebal) - Mengandung alergen ... (diikuti dengan nama alergen yang dicetak tebal)	- Diproduksi menggunakan peralatan yang juga memproses ... (diikuti dengan nama alergen) - Mungkin mengandung ... (diikuti dengan nama alergen); atau - Dapat mengandung ... (diikuti dengan nama alergen).

Ketentuan Label 'Mengandung Alergen'

Industri pangan olahan harus mematuhi ketentuan pelabelan pangan 'Mengandung Alergen' untuk produk yang mengandung bahan alergen. Jika pada pangan olahan terdapat bahan alergen tertentu, maka wajib mencantumkan daftar bahan alergen dengan tulisan yang dicetak tebal. Kemudian di bawah informasi daftar bahan tersebut disertai keterangan berupa "Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal".

Selain itu, pangan olahan yang diproduksi menggunakan sarana produksi yang sama dengan pangan olahan yang mengandung alergen wajib pula mencantumkan keterangan pada label. Penggunaan sarana produksi yang sama ini dapat menyebabkan kontaminasi silang, yang berpotensi menimbulkan reaksi alergi bagi konsumen yang memiliki alergi.

Pencantuman keterangan alergen tersebut harus berdekatan dengan daftar bahan. Namun ketentuan tersebut dapat dikecualikan jika pelaku usaha pangan olahan dapat menjamin tidak ada jejak atau trace alergen pada sarana produksi yang dibuktikan dengan

dokumen validasi.

Oleh karena itu, sebagai konsumen yang cerdas, kita harus selalu berupaya untuk mengonsumsi pangan olahan yang aman, bermutu, dan bergizi. Untuk mengurangi risiko yang timbul akibat alergi pangan, maka ingat Kata BPOM untuk selalu Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli/mengonsumsi pangan olahan. Bagi konsumen yang memiliki riwayat alergi agar menghindari mengonsumsi pangan yang mengandung



Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan tanggal Kedaluwarsa)

alergen dengan memperhatikan daftar bahan yang dicetak tebal pada label. Selain itu, konsumen yang memiliki riwayat alergi agar mengenali gejala awal alergi pangan dan langkah penanggulangannya. ■

4 Bahan yang Dapat Digunakan untuk Mengawetkan Bakso, Tahu, dan Mie



Penyalahgunaan bahan berbahaya untuk mengawetkan produk bakso, tahu, dan mie masih banyak ditemukan. Padahal, dampaknya berbahaya bagi kesehatan.

B POM telah menstandarisasi beberapa inovasi bahan alam yang dapat digunakan untuk mengawetkan produk bakso, tahu, dan mie.

Berikut adalah 4 bahan yang bisa digunakan untuk mengawetkan produk bakso, tahu, dan mie!



LARUTAN CHITOSAN

Dibuat dari chitosan dalam air dengan penambahan asam dan basa

Fungsi

Bahan pengawet bakso, mie, dan tahu

Batas Maksimal

Secukupnya untuk menghasilkan efek yang diinginkan

Cara Penggunaan

Campurkan larutan chitosan pada proses produksi mie basah, tahu segar, dan bakso daging dengan takaran 100 mL larutan untuk 1 kg produk



FERMENTASI BUAH PISANG



Hasil proses fermentasi terhadap ekstrak buah pisang dengan/tanpa penambahan gula menggunakan *starter* kultur bakteri asam laktat jenis *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus bulgaricus*, dan *Lactobacillus casei* untuk menghasilkan asam laktat sebagai produk utama.

Fungsi

↳ Bahan pengawet tahu

Batas Maksimal

↳ Secukupnya untuk menghasilkan efek yang diinginkan

Cara Penggunaan

↳ Tambahkan cairan fermentasi buah pisang saat proses penggumpalan tahu (4 mL dalam 1 L bahan) atau dapat juga campurkan cairan fermentasi buah pisang ke dalam air untuk merendam tahu (40 mL dalam 1 L air)



EKSTRAK GAMBIR



Serbuk yang diperoleh dari hasil ekstraksi gambir (padatan kering yang dibuat dari daun *Uncaria gambir* (Hunter) Roxb.) dengan pelarut

Fungsi

↳ Bahan pengawet tahu dan bakso

Batas Maksimal

↳ Maksimal 20.000 mg/kg (20 g/mg atau 2%)

Cara Penggunaan

↳ Larutkan ekstrak gambir dengan air, kemudian gunakan larutan tersebut untuk merendam tahu atau bakso daging selama 1 jam, lalu tiriskan



FORMULASI ASAP CAIR, PANDAN, DAN GARAM



Hasil formulasi dari asap cair (sabut kelapa, tempurung kelapa, tempurung kemiri) dengan penambahan bahan pangan lain, dan tidak ditambahkan bahan tambahan pangan pengawet lain

Fungsi

↳ Bahan pengawet tahu

Batas Maksimal

↳ Maksimal 1.000 mg/kg

Cara Penggunaan

↳ Tambahkan produk formula ke *curd* kedelai, air garam/laru, dan air rendaman tahu (total maksimal 1000 mg/kg)



Share konten ini agar bakso, tahu, dan mie yang ada di sekitar kita aman untuk dikonsumsi!





"Stamina" BPOM

Kawal Distribusi Obat Instalasi Farmasi Pemerintah

Penulis : Fadlan Khaerul Anani
Editor : Hendiq Fauzan Kustanto

Waktu bagaikan pedang. Jika kita tak bisa memanfaatkannya, waktu akan menghabiskan kita. Bagaimana jika waktu tidak dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendistribusikan obat? Jelas, hal itu akan membahayakan banyak nyawa orang yang sakit karena tidak mendapatkan akses obat. Lebih parah lagi, apabila mandeknya distribusi obat tersebut terjadi di instalasi farmasi pemerintah (IFP). Sedangkan IFP menjadi harapan bagi banyak orang untuk mengakses biaya pengobatan yang terjangkau.

Masalah distribusi obat tak hanya soal waktu. Distribusi obat harus dilakukan dengan baik, artinya obat dipastikan mutunya sepanjang jalur distribusi sesuai persyaratan. Memastikan mutu berarti obat yang dihasilkan industri harus tetap stabil sepanjang jalur distribusi sampai dengan digunakan oleh pasien. Hal penting lainnya yaitu menjaga jalur distribusi ini dari masuknya obat ilegal, dan menjaga agar obat tidak "bocor" ke jalur ilegal. Semua proses tersebut menghasilkan dokumentasi yang dapat

membantu penelusuran masalah jika terjadi krisis yang berkaitan dengan obat. Lantas bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjaga distribusi obat di Indonesia?

Seperti Atlet Lari

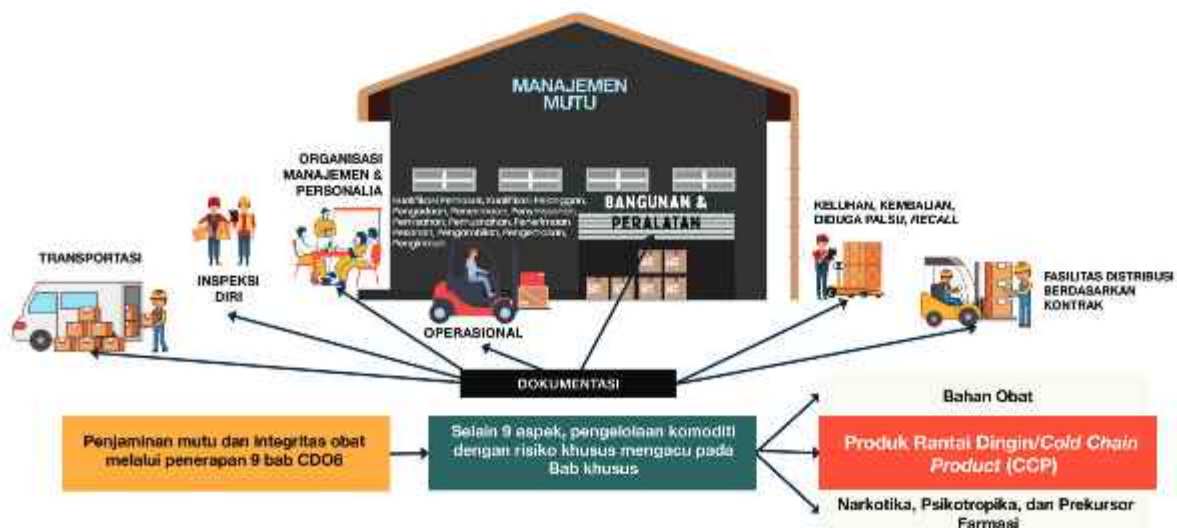
Dalam distribusi obat, BPOM mempunyai peran seperti atlet lari. BPOM memastikan di setiap pemberhentian, obat terjamin keamanan, khasiat, dan mutunya. Di saat yang sama, BPOM sendiri harus memastikan kapasitasnya untuk tetap fit dalam

melakukan pengawasan. Pada 2023, BPOM telah memeriksa sebanyak 9.263 sarana distribusi obat hingga Triwulan III. Jumlah ini paling banyak di antara komoditas lain yang diawasi oleh BPOM. Dari jumlah tersebut, 7.046 sarana distribusi obat telah memenuhi ketentuan (MK) dan 2.207 tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Pada 2022, BPOM telah melakukan pengawasan terhadap 637 IFP. Dari jumlah tersebut sebanyak 461 IFP telah mencapai status MK dan sejumlah 76 IFP berstatus TMK. Pengawasan intensif

Cara Distribusi Obat yang Baik

BADAN POM



Aspek-Aspek Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)

dilakukan karena Survei Efektivitas Penerapan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Obat Tahun 2021 menunjukkan bahwa IFP memiliki gap dengan tingkat penerapan cara distribusi obat yang baik (ODOB) yang lebih rendah dibandingkan dengan pedagang besar farmasi (PBF). Lalu, bagaimana BPOM membina IFP untuk meningkatkan kapasitasnya dalam distribusi obat?

BPOM Membina IFP

BPOM telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas IFP. Dalam melakukan pembinaan, BPOM mendorong IFP untuk memastikan ketertelusuran dalam proses distribusi obat. Dalam aspek terkait suhu, BPOM mewajibkan IFP untuk melakukan pencatatan suhu penyimpanan secara rutin, melakukan kalibrasi berkala pada alat pengukur suhu, melengkapi tempat penyimpanan vaksin dengan alarm peringatan suhu kritis, dan monitoring suhu dalam pengiriman vaksin. Pada aspek terkait pasokan obat, BPOM meminta IFP untuk melakukan kualifikasi pada pemasok dan pelanggan, melakukan skrining terhadap kebenaran dan keabsahan surat pesanan, mengecek kesesuaian fisik barang dan faktur terhadap nomor bets, jumlah produk dan tanggal kedaluwarsa, serta kartu stok.

Kami memberikan apresiasi pada IFP yang telah berhasil terapkan CDOB dan telah dilakukan verifikasi oleh BPOM

- PIt. Kepala BPOM, L. Rizka Andalusia -

BPOM juga melakukan beberapa inisiatif untuk meningkatkan kapasitas IFP. Pada pertengahan tahun 2022, BPOM memulai *pilot project* visitasi IFP dalam rangka penerbitan Surat keterangan pemenuhan ODOB.



Forum Koordinasi Perkuatan Sistem Mutu Fasilitas Distribusi Sektor Pemerintah Tahun 2023 (22/11/2023). PIt. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif menyerahkan Surat Keterangan Pemenuhan ODOB kepada IFP Kabupaten Siak dan Kabupaten Sleman.

Visitasi dilakukan pada IFP yang telah menerapkan/tersertifikasi ISO 9001:2016 dan memperoleh nilai memuaskan berdasarkan hasil penilaian oleh Kementerian Kesehatan.

Hingga 2023, BPOM telah melakukan visitasi terhadap 18 IFP. Dari 18 IFP tersebut, IFP Kabupaten Sleman dan IFP Kabupaten Siak telah memenuhi syarat untuk memperoleh surat keterangan ODOB. Sebelumnya pada 2020, BPOM telah menyerahkan surat keterangan ini kepada IFP Kabupaten Tangerang, dan pada 2021 kepada IFP Kabupaten Musi Banyuwasin.

Selain itu, pada 2023 BPOM juga memfasilitasi forum komunikasi dengan IFP melalui Forum Koordinasi Perkuatan Sistem Mutu Fasilitas Distribusi Sektor Pemerintah diikuti oleh perwakilan dari IFP kabupaten/kota, serta dinas kesehatan provinsi/kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Dalam forum komunikasi tersebut, PIt. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, Togi J. Hutadjulu, menyampaikan IFP diharapkan secara sukarela memperoleh sertifikat ODOB. Saat ini, perolehan sertifikat ODOB belum menjadi *mandatory* bagi IFP di provinsi dan kabupaten/kota. Sertifikat tersebut

nantinya bisa menjadi bukti bahwa fasilitas IFP mendistribusikan obat secara legal dan tepat.

Dalam *talkshow* yang diadakan pada kegiatan ini, Sri Winarni dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa ODOB sangat penting karena ketika obat didistribusikan dengan tidak benar, dapat mengganggu dan berpengaruh pada kesembuhan pasien. Ia juga menekankan bahwa IFP seharusnya menjadi teladan bagi sarana distribusi obat swasta/pedagang besar farmasi (PBF) dalam pendistribusian obat secara benar.

Unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah juga terlibat dalam melakukan pembinaan kepada IFP. UPT BPOM berkoordinasi dengan pimpinan daerah untuk membangun komitmen dalam meningkatkan kualitas IFP di wilayahnya. UPT BPOM memberikan bimbingan teknis penyiapan pemenuhan ODOB, serta *desk konsultasi* dan konsultasi *online* antara apoteker di IFP dengan petugas BPOM. Dengan segala upaya dan usaha yang dilakukan ini, diharapkan 16 IFP lain yang telah dilakukan visitasi dapat memperoleh Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan ODOB di masa mendatang. ■



Penulis : Undayana
Editor : Hendiq Fauzan Istanto

Vaksin Pneumonia Selamatkan Anak Indonesia dari Pneumonia

Pneumonia atau yang sering disebut sebagai radang paru-paru merupakan penyebab kematian tertinggi ketiga pada bayi dan balita. Data tersebut ditunjukkan oleh Survei Sample Registration System yang dilaksanakan oleh Balitbangkes pada tahun 2016. Di tahun 2018 diperkirakan sekitar 19.000 anak

meninggal dunia akibat pneumonia. Mengingat tingginya kasus dan kematian ini, pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai upaya dilakukan mulai dari penyusunan rencana aksi nasional hingga pengawalan pengembangan vaksin dan pemberian izin edarnya untuk mencegah pneumonia pada jutaan anak-anak Indonesia.

Apa itu pneumonia?

Pneumonia merupakan salah satu jenis penyakit infeksi saluran napas yang disebabkan oleh bakteri *Streptococcus pneumoniae*. Pneumonia menyebabkan peradangan kantong udara di salah satu atau kedua bagian paru-paru. Pneumonia dapat menular dengan cepat melalui tetesan atau droplet dari batuk atau bersin seseorang yang mengidap pneumonia.

Tidak hanya pada orang dewasa, pneumonia dapat terjadi sejak bayi lahir. Bayi yang lahir prematur memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terjadinya pneumonia. Data surveilans Kementerian Kesehatan (Kemendes) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2011-2021, jumlah kasus pneumonia pada usia balita lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia lebih dari 5 tahun. Pada 2021 tercatat sekitar 278.261 balita yang

terkena pneumonia. Penyakit ini memiliki kontribusi cukup besar terhadap angka kesakitan dan kematian anak di bawah lima tahun.

Tidak hanya di Indonesia, kondisi ini terjadi pada sebagian besar negara berkembang. Estimasi global menunjukkan bahwa setiap satu jam terdapat 71 anak di Indonesia yang tertular pneumonia. Menurut WHO, pneumonia berkontribusi terhadap 14%

kematian pada balita di dunia pada 2019.

Pemerintah telah berupaya melakukan pengobatan dengan memberikan antibiotik sesuai tata laksana penanganan kasus pneumonia, namun angka kejadian ini tidak menurun signifikan. Walaupun jika dilihat pada capaian Kemenkes 2022, pengobatan di sebagian besar wilayah Indonesia telah melebihi target persentase yang ditentukan.

Pneumonia sendiri termasuk penyakit yang dapat diobati. Meski demikian, tentu akan lebih baik jika melakukan pencegahan dengan selalu menjaga kebersihan serta pemberian vaksinasi. Vaksinasi menjadi langkah penting untuk mencegah penyakit pneumonia, terutama pada anak-anak. Menurut penelitian, faktor risiko pneumonia meningkat pada anak-anak yang tidak divaksinasi.

Vaksin pneumonia buatan Indonesia

Kabar baik datang pada bulan Oktober 2023, BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia, menerbitkan nomor izin edar (NIE) untuk vaksin pneumonia pada balita yang dinamai vaksin Valenina. Vaksin ini akan diproduksi oleh PT Etana Biotechnologies Indonesia melalui proses Transfer teknologi dari Yuxi Walvax Biotechnology. Proses transfer teknologi meliputi penyiapan fasilitas produksi untuk aktivitas *fill and finished* sesuai pedoman GPOB. Studi validasi proses dan stabilitas produk jadi direncanakan akan selesai pada akhir

tahun 2024 sehingga Valenina dapat diproduksi dalam negeri pada tahun 2025. Selain di Indonesia, Valenina juga sudah terdaftar di China dan Maroko.

Pemberian izin edar Valenina merupakan langkah konkrit untuk melindungi anak Indonesia dari pneumonia dengan pemberian vaksin sebagai pencegahan. Proses ini diawali dengan serangkaian uji klinik melalui pengawasan pengembangan vaksin oleh BPOM. BPOM telah mengawal uji klinik fase III dan registrasi Valenina untuk balita ini sejak 2 tahun lalu.

Vaksin ini ditargetkan akan diproduksi lokal pada tahun 2025, sehingga vaksin akan lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Vaksin Valenina ditujukan untuk bayi dan anak-anak berusia 6 minggu hingga 6 tahun (sebelum ulang tahun ke-6) untuk membantu mencegah penyakit invasif yang disebabkan oleh infeksi *Streptococcus pneumoniae* yang disebabkan oleh 13 tipe *strain* bakteri *Streptococcus pneumoniae*.

Sebelumnya sudah beredar vaksin inovator dengan tipe *strain* yang sama namun berbeda konjugasi proteinnya. Vaksin Prevenar lebih dikenal dengan sebutan PCV (Pneumococcal Conjugate Vaccine) yang berguna untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri pneumococcus penyebab pneumonia. Vaksin PCV yang disuntikkan ke dalam tubuh nantinya akan memicu sistem imun untuk memproduksi antibodi khusus. Antibodi inilah yang berguna melawan infeksi

bakteri pneumococcus yang masuk ke dalam tubuh. Efikasi vaksin Valenina setara dengan efikasi vaksin Prevenar sebesar 94%, dengan 93-99% subjek terbentuk antibodi proteksi.

Uji klinik akan dilakukan di RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar. Uji klinik dilakukan dengan merekrut 600 subjek yang mulai dilakukan pada minggu kedua November 2023. Uji klinik ini ditujukan untuk menilai pemberian vaksin yang lebih efisien, dan diberikan bersamaan dengan vaksin program seperti vaksin DTP, Hib, Hep B, dan Polio.

Sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia, BPOM senantiasa berkomitmen untuk mendukung kemandirian obat dan vaksin nasional. Terutama dalam menjawab tantangan dan melindungi bangsa Indonesia dari berbagai ancaman kesehatan. Pengawasan yang diberikan BPOM berupa serangkaian kegiatan seperti asistensi regulatori, diskusi, konsultasi, dan *desk corrective action preventive action* (OAPA) hingga proses sertifikasi cara produksi obat yang baik terhadap fasilitas produksi. Pengawasan fasilitas PT Etana oleh BPOM akan terus berlangsung sesuai peta jalan transfer teknologi. Hingga nantinya diharapkan pada tahun 2025, PT Etana mampu memproduksi vaksin Valenina secara lokal, untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia dari pneumonia. ■



Ilustrasi proses
Vaksinasi pada anak



Germas Sapa Dukung Visi Indonesia Emas 2045

Penulis : Putri Syarifawati
Dewintha Syandi K
Editor : Hendriq Fauzan Kustanti



Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA) mulai digulirkan pada 2017 oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud). BPOM menjadi inisiator program Germas SAPA yang berfokus pada keamanan pangan berbasis masyarakat. Program ini mendukung upaya pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Satu abad usia emas Indonesia akan dicapai pada tahun 2045. Pada masa tersebut, Indonesia ditargetkan menjadi negara maju dan sejajar dengan negara adidaya. Di tahun 2045 Indonesia juga mengalami bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif meningkat. Bonus ini harus dapat dimanfaatkan

sebaik-baiknya dengan mewujudkan SDM Indonesia yang unggul, berkualitas, dan berkarakter. Walaupun momentum bersejarah ini masih sekitar seperempat abad lagi, untuk mewujudkannya dibutuhkan persiapan yang matang sejak jauh-jauh hari, sejak hari-hari ini.

Pada kenyataannya, saat ini Indonesia memiliki tantangan gizi ganda

sebesar 16,0% pada remaja usia 13--16 tahun dan 13,6% pada remaja usia 16--18 tahun. Kedua kondisi tersebut merepresentasikan kondisi gizi pada remaja di Indonesia yang harus diperbaiki.

Permasalahan gizi ini dapat diintervensi dari sisi keamanan pangan. Keamanan pangan mempunyai kontribusi dalam peningkatan kesehatan karena merupakan prasyarat untuk memperoleh pangan bergizi. Hanya ketika pangan sudah aman, barulah pangan tersebut dapat memenuhi kebutuhan gizi, membantu orang dewasa untuk hidup sehat dan aktif, serta anak-anak untuk tumbuh dan berkembang lebih maksimal.

Bahkan dalam konteks Strategi Pembangunan Global, keamanan pangan terkait erat setidaknya dengan 3 dari 17 Sustainable Development Goals 2030 (SDGs). SGD tersebut antara lain SDG ke-2, Zero hunger (menghilangkan kelaparan), di mana pangan aman berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan manusia sehingga tidak terjadi kelaparan; SDG ke-3, Good health, and well-being (kehidupan sehat dan sejahtera), di mana pangan aman merupakan prasyarat terbentuknya masyarakat yang sehat dan sejahtera; serta SDG ke-12 Responsible Consumption and Production, di mana pangan aman dapat berkontribusi untuk penurunan food waste dan food loss.



(double burden) yaitu kekurangan gizi (stunting, wasting) dan kelebihan gizi (obesitas). Data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa 26,7% remaja usia 13--16 tahun dan 26,9% remaja usia 16--18 tahun menyandang status gizi pendek dan sangat pendek. Di lain sisi, data Kementerian Kesehatan tahun 2020 menunjukkan prevalensi berat badan lebih dan obesitas

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terpadu. Kata "terpadu" didefinisikan dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Untuk itulah BPOM menginisiasi program dan kegiatan di bidang keamanan pangan dengan melibatkan masyarakat yaitu (1) Program Desa Pangan Aman, (2) Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, serta (3) Program Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman. Ketiga program ini diintegrasikan melalui Program Germas SAPA.

Program ini merupakan bentuk intervensi keamanan pangan kepada komunitas masyarakat, pelaku usaha, dan sekolah agar menjadi masyarakat mandiri dalam hal keamanan pangan. Intervensi dilakukan melalui *aisi supply* (kegiatan pembinaan pelaku usaha pangan baik produsen maupun ritel) dan

aisi demand (kegiatan pemberdayaan kader dan komunitas masyarakat yang cerdas dalam melakukan edukasi keamanan pangan). Strategi dua arah ini diharapkan efektif membangun kemandirian masyarakat dan pelaku usaha dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan aman, bermutu, dan bergizi.

Germas SAPA juga menjadi salah satu program untuk mendukung penurunan *stunting* sesuai pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Dengan demikian, Germas SAPA menjadi salah satu solusi dalam penanganan permasalahan gizi di Indonesia.

Dalam rangka memperkuat koordinasi terkait program Germas SAPA, BPOM menyelenggarakan pertemuan teknis Germas SAPA di Jakarta, Kamis (19/10/2023). Dengan tema "Germas SAPA untuk membentuk SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing dalam

mewujudkan Indonesia Emas 2045". Dalam kegiatan tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Rita Endang berpesan, pemerintah daerah/desa diharapkan dapat mereplikasi program Germas SAPA secara mandiri dan berkelanjutan. "Pemerintah daerah/desa dapat melakukan studi tiru ke daerah yang memiliki *success story* dalam pelaksanaan Germas SAPA" jelasnya.

Dalam forum ini juga diadakan dialog dengan narasumber yang memiliki *success story* tersebut. Salah satu Desa Pangan Aman terbaik yaitu Kalurahan Panggungharjo, Kabupaten Bantul, Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap tahunnya, BPOM memang memberikan penghargaan kepada pihak yang telah menjalankan program Germas SAPA dengan baik. Tujuannya untuk memberikan apresiasi kepada mereka yang telah menumbuhkan semangat, kreativitas, dan partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan keamanan pangan melalui Germas SAPA.



Lurah Panggungharjo, Wahyudi Anggoro Hadi berbagi pengalaman pada pertemuan teknis Germas SAPA di Jakarta, Kamis (19/10/2023)

Lurah Panggungharjo, Wahyudi Anggoro Hadi menyampaikan kiatnya menjadi yang terbaik. "Program Desa Pangan Aman di Panggungharjo menitikberatkan pada lokus intervensi keluarga melalui model pendekatan *coaching, mentoring, dan consulting*," ungkap Wahyudi yang juga merupakan seorang apoteker. Menurutnya yang juga tak kalah penting ialah intervensi lokus ekosistem desa melalui kolaborasi, mulai dari bahan baku pangan aman, produksi pangan aman, dan pemasaran produk pangan aman.

Germas SAPA menjadi satu dari program BPOM dalam mengawal keamanan pangan untuk Indonesia Emas 2045. BPOM berkomitmen untuk terus mengembangkan berbagai program dalam rangka meningkatkan pengawasan keamanan pangan. Hal ini semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan daya saing bangsa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. ■



Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Rita Endang pada pertemuan teknis Germas SAPA di Jakarta, Kamis (19/10/2023)



Penulis : Tattiana Samantha Putri
Editor : Hendiq Fauzan Kustanto

Codex Indonesia

Jaga Keamanan Pangan dan Lindungi Daya Saing Bangsa

Pentingnya keamanan pangan telah menjadi fokus utama di seluruh dunia. Dalam konteks Ini, Codex memegang peranan penting dalam mengatur dan memastikan keamanan pangan secara Internasional.



Delegasi Ri, Nugroho Indratristanto (BPOM), Dasep Wahidin (BPOM), Rhapsaia Widhiastuti (BRIN), dan Sultistiyorini (Bapanas) pada sidang Komite Codex Committee on Contaminants di Belanda (18-21 April 2023)

Codex Alimentarius Commission (CAC), biasanya disebut Codex, merupakan organisasi yang dibentuk oleh Food and Agriculture Organization (FAO) dan World Health Organization (WHO). Organisasi ini bertujuan untuk melindungi kesehatan konsumen dan menjamin terciptanya praktik perdagangan internasional yang adil. Standar yang ditetapkan oleh Codex dijadikan acuan oleh negara anggotanya dalam mengembangkan standar dan regulasi nasional di bidang pangan. Dengan jumlah anggotanya yang meliputi hampir seluruh negara di dunia, standar yang ditetapkan Codex memegang peranan yang penting dalam perdagangan global.

Codex Indonesia

Keanggotaan suatu negara di forum Codex diwakili oleh instansi pemerintah.

Namun dalam pelaksanaan kegiatannya, keterlibatan pemangku kepentingan lain seperti pakar, pelaku usaha, dan konsumen, serta koordinasi antar instansi pemerintah sangat diperlukan. Oleh karena itu, Indonesia sebagai salah satu negara anggota Codex perlu mengelola dengan baik kegiatan Codex di tingkat nasional agar dapat berpartisipasi secara aktif dan efektif di forum Codex.

Codex Indonesia merupakan perwujudan komitmen bersama antar instansi pemerintah yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang keamanan dan mutu pangan, baik untuk pangan segar, pangan olahan, maupun pangan olahan siap saji. Mulai dari produksi, penyimpanan, pengangkutan peredaran, hingga perdagangan pangan termasuk ekspor/impor pangan. Instansi tersebut antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, BPOM, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Badan Standardisasi Nasional (BSN). Codex Indonesia juga didukung oleh Kementerian Luar Negeri, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BSN Nomor 696/KEP/BSN/12/2021 tentang Keanggotaan Codex Indonesia, BPOM menjadi Koordinator mirror committee (MC) untuk Sidang Codex Committee on Food Additives (CCFA), Codex Committee on Contaminants in Foods (CCOF), Codex Committee on Food Labelling (CCFL) dan Codex Committee on Nutrition for Foods Special Dietary Uses (CCNFSDU). Sesuai dengan mandat tersebut, BPOM yang diwakili oleh Direktorat Standardisasi Pangan Olahan mengoordinasikan pertemuan dalam rangka merevisi dokumen Codex, menyusun posisi Indonesia, membahas dokumen Codex pada *Electronic Working Group (EWG)*, dan *Circular Letter (CL)* untuk persiapan sidang serta mengusulkan delegasi Indonesia (DELRI). Dalam setiap pembahasan, BPOM melibatkan *stakeholder* lain untuk memfasilitasi kepentingan Indonesia dalam forum Codex dan internasional lainnya.

Partisipasi Aktif dalam Forum Codex

Partisipasi aktif Indonesia di Forum Codex dimulai sejak 1971. Pada 1987, Indonesia mulai terlibat dalam kepemimpinan Codex yang diwakili oleh Bapak Teknologi Pangan Indonesia, F.G Winarno (Vice Chair Codex 1987-1989 dan 1989-1991, dan Chair Codex 1991-1993 dan 1993-1995). Guru

Besar Fakultas Teknologi Pertanian IPB Prof. Purwiyatno Hariyadi juga pernah menjabat sebagai Vice Chair of the FAO/WHO Codex 2017-2020. Kepemimpinan Indonesia dalam Codex tidak hanya menunjukkan peran aktif, tetapi juga membuka peluang untuk memperjuangkan posisi Indonesia dalam penyusunan standar internasional pangan di forum tersebut.

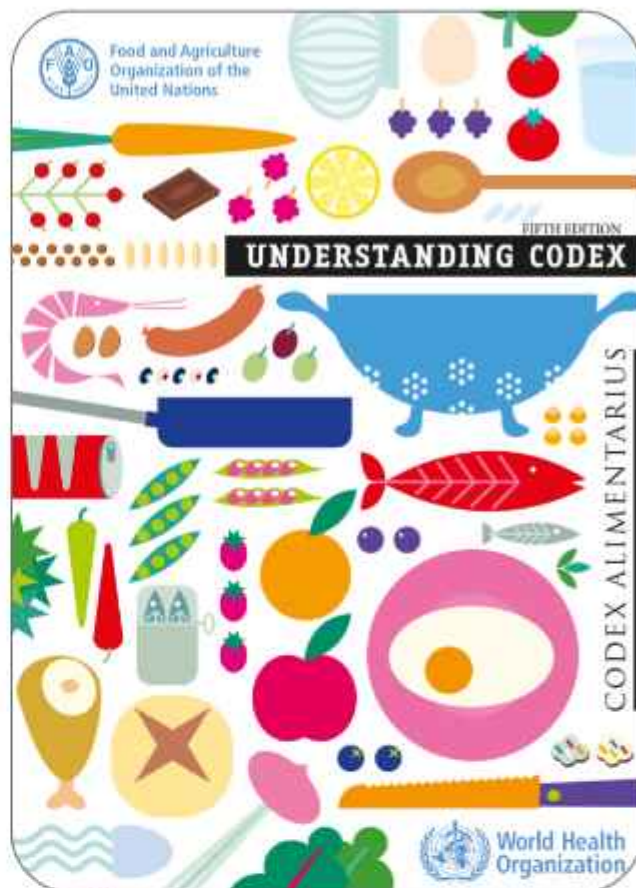
Pasca era Pandemi tahun 2023, BPOM kembali berpartisipasi aktif secara luring dalam rangkaian sidang OONFSDU ke-43 di Jerman, sidang COFA ke-53 di Hongkong, sidang COCF ke-16 di Belanda, dan sidang COFL ke-47 di Kanada. Selain itu, pada 2020-2023 BPOM telah memberikan lebih dari 60 komentar dalam forum EWG. Hal ini untuk memastikan posisi Indonesia didengar oleh dunia dalam pembahasan standar internasional pangan.

Menilik isu terhangat beberapa waktu lalu, Indonesia mengalami permasalahan ekspor terkait keberadaan senyawa Etilen Oksida (EtO) dalam pangan olahan. Etilen oksida merupakan senyawa kimia yang banyak digunakan untuk sterilisasi bahan mentah dalam proses produksi. Namun senyawa ini diidentifikasi sebagai senyawa yang bersifat karsinogenik, mutagenik, dan toksik. Nyatanya ketentuan mengenai batasan kandungan senyawa tersebut belum diatur oleh Codex maupun WHO. Sebagai bentuk partisipasi aktif BPOM dalam merespon isu tersebut, pada 2023 Indonesia

mengusulkan ethylene oksida (EtO) dan 2-chloroetanol (2-CE) kepada Codex agar dapat dimasukkan ke dalam daftar prioritas untuk dievaluasi oleh Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA).

Implementasi Codex di Indonesia

Tuntutan pasar global terkait jaminan keamanan pangan semakin meningkat. Di tengah dinamika tersebut, standar, pedoman, dan *code of practice* Codex menjadi landasan penting dalam mengawasi keamanan dan memastikan kualitas pangan. Di Indonesia, standar Codex berperan sebagai rujukan utama dalam proses pengembangan standar dan kebijakan dalam sistem pengawasan pangan yang efektif.



Dengan memberikan landasan standar yang kuat, implementasi Codex di Indonesia memberikan perlindungan yang diperlukan kepada konsumen. Di saat yang sama, manfaat untuk industri pangan mencakup fasilitasi perdagangan global serta pengakuan terhadap kualitas dan keamanan produk dalam menjaga kesehatan konsumen. Selanjutnya juga dapat mendorong inovasi, kepatuhan terhadap regulasi nasional, serta memenuhi persyaratan perdagangan internasional. Adopsi standar Codex membantu industri memperoleh kepercayaan pasar global dan meningkatkan daya saing produknya.

Pada akhirnya melalui partisipasi aktif Indonesia dalam Codex, diharapkan kepentingan perdagangan dan jaminan keamanan pangan komoditas ekspor Indonesia dapat tergaransi. Yakni dengan memberikan jaminan terhadap produk pangan, baik yang diproduksi dalam negeri maupun produk yang masuk ke dalam negeri, serta melindungi dan meningkatkan daya saing produk pangan Indonesia di pasar global. ■



Deleksi Ri, Lir Delfi Z (BPOM) dan Dyah Setyowati (BPOM) pada sidang Komite Committee on Food Additives di Hong Kong, China (27-31 Maret 2023)

5 KOSMETIK ILEGAL

PALING BANYAK DITEMUKAN
DI MARKETPLACE



Berdasarkan Hasil Patroli Siber
(Januari-September 2023)



01

KRIM HN

8116 Link Penjualan



Di urutan pertama adalah **kosmetik HN** yang termasuk produk kosmetik tanpa izin edar dan **mengandung bahan berbahaya**, yaitu merkuri.

02

KRIM DIAMOND

6986 Link Penjualan

Di urutan ke-2 ada **kosmetik Diamond** yang termasuk produk kosmetik tanpa izin edar dan **mengandung bahan berbahaya**, yaitu merkuri.



03

TABITA SKINCARE

3778 Link Penjualan



Di urutan ke-3 ada **kosmetik Tabita** yang termasuk produk kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya/dilarang, yaitu **merkuri dan hidrokuinon**.

04

TATI SKINCARE

1791 Link Penjualan



Di urutan ke-4 ada kosmetik **Tati Skincare** yang termasuk kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya/dilarang, yaitu **merkuri, hidrokuinon, dan tretinoin**.

HB DOSTING

1447 Link Penjualan

05

Di urutan ke-5 ada kosmetik ilegal yang sedang viral di media sosial, yaitu **hand and body lotion dosis tinggi (HB Dosting)**.





Berikan Kemudahan Perizinan Berusaha, BPOM Raih Penghargaan

Penulis : Muhammad Rizky
Editor : Dian Hermawati

BPOM dinobatkan sebagai kementerian/lembaga Terbaik ketiga atas Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha dalam Anugerah Layanan Investasi Tahun 2023. Apresiasi ini diberikan atas keaktifan BPOM dalam memberi kemudahan perizinan bagi pelaku usaha obat dan makanan, simplifikasi, dan deregulasi kebijakan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Kebijakan ini diambil demi percepatan pelaksanaan berusaha UMKM di tanah air.

Predikat tersebut diraih setelah upaya-upaya yang dilakukan BPOM untuk mendorong percepatan perizinan berusaha sejak tahun 2021. Ketika itu, BPOM menerbitkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.204.21.183 Tahun 2021 tentang Program Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021. Selanjutnya, mulai dilakukan pembahasan internal, lalu disosialisasikan melalui forum konsultasi publik.

Pada dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mendapatkan persetujuan Presiden, maka BPOM menetapkan dan mengundang Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan pada 1 April 2021.

Ini merupakan cerita di balik proses penyusunan dan keberadaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait perizinan berusaha berbasis risiko.

Selain Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021, BPOM juga memiliki peraturan lainnya dalam mendorong percepatan pelaksanaan berusaha (PPB), antara lain: Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan; Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan; Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Unit-unit kerja pelaksana di BPOM pun telah membentuk tim kerja beserta program kerja, demi peningkatan iklim berusaha di Indonesia.

BPOM juga telah melaksanakan

pengintegrasian dan verifikasi perizinan berusaha melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). OSS-RBA merupakan layanan perizinan secara daring yang terintegrasi dan terpadu dengan paradigma perizinan berbasis risiko. Dalam layanan yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada 9 Agustus dua tahun silam ini, jenis perizinan akan disesuaikan dengan tingkat risikonya. Jokowi jelaskan upaya ini perlu untuk mendorong iklim berusaha di Indonesia yang semakin kondusif.

Selain itu, layanan publik BPOM telah mengimplementasikan fitur *Single Sign On (SSO)* sejak November 2021. Sistem SSO memudahkan pengguna layanan BPOM dengan hanya perlu satu kali login untuk membuka semua layanan aplikasi yang sudah didaftarkan sebelumnya.

Atas simplifikasi dan deregulasi tersebut, BPOM juga mendapat penghargaan lainnya dalam penghargaan pelayanan publik di tahun 2023, antara lain:

- Predikat Pelayanan Prima untuk BBPOM di Yogyakarta dalam Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga (Kementerian PANRB);
- Predikat Badan Publik Informatif selama 4 tahun berturut-turut dengan nilai 98,14 pada tahun 2023 (BPOM sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang memperoleh nilai tertinggi dari sebanyak 32 badan publik yang lolos tahap uji publik pada monitoring dan evaluasi KIP tahun 2023);



Peluncuran OSS-RBA oleh Presiden Jokowi
Foto: BPOM Setpres/Lukas. Diikutip dari www.president.go.id pada 10 Januari 2024.

- *Gold Medal* kategori The Best of The Best Agent Digital Inbound; *Silver Medal* untuk kategori The Best Agent Digital Media Sosial; *Bronze Medal* untuk kategori The Best Agent Email dalam kategori individual; serta *Gold Medal* pada The Best Quality Team, dan *Silver Medal* pada The Best Accuracy Team dalam kategori Teamwork pada ajang kompetisi The Best Contact Center Indonesia (TBOCI) 2023 (Indonesia Contact Center Association (IOCA));
- Peringkat Pertama Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tingkat Lembaga Pemerintah (Zonasi Hijau Kategori A Kualitas Tertinggi) (Ombudsmans RI);
- Terbaik Kementerian/Lembaga dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

- Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 (Kementerian PANRB);
- Balai Besar POM di Yogyakarta menjadi salah satu dari 5 (lima) UPP dengan nilai tertinggi di tingkat Kementerian/Lembaga dalam penyediaan sarana prasarana ramah kelompok rentan (Kementerian PANRB);
 - Terbaik ketiga pada kategori Kementerian Negara/Lembaga yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) (Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kementerian Investasi);
 - TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik bagi BBPOM Yogyakarta untuk Inovasi Berpendar (Bersama Memperoleh Ijin Edar) (Kementerian PANRB).
- Penghargaan ini menjadi pemicu

semangat BPOM untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publiknya. Tidak hanya untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, tapi juga sebagai kanal bagi masyarakat jika memerlukan penanganan pengaduan dan keluhan dalam prosedur pelayanan.

Pengaduan dan keluhan dapat disampaikan melalui:

- situs bpom.lapor.go.id;
- aplikasi SP4N LAPOR!;
- e-mail halobpom@pom.go.id;
- subsite ulpk.pom.go.id;
- aplikasi BPOM Mobile; maupun kanal informasi resmi di media sosial BPOM. Masyarakat juga dapat mengunjungi Gedung Pelayanan Publik BPOM di: Jl. Peroretan Negara No. 23, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. ■

Kemudahan Layanan Publik BPOM

a. Obat

1. Penghapusan Approvable Letter/AL untuk registrasi obat yang sudah melakukan produksi skala komersial, sehingga tidak dikeluarkan AL, tetapi langsung NIE;
2. Persetujuan obat baru dengan mekanisme relance yang sebelumnya disetujui di 3 negara menjadi cukup 1 negara, namun dokumen mutu obatnya harus sama;
3. Mempersingkat beberapa proses registrasi, sertifikasi, dan ekspor-impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor, yaitu:
 - Registrasi obat pengembangan baru (100 Hari Kerja (HK) menjadi 60 HK)
 - Registrasi pertama obat baru yang melakukan investasi di Indonesia (300 HK menjadi 100 HK)
 - Registrasi obat generik yang melakukan investasi di Indonesia (160 HK menjadi 75 HK)
 - Certificate of Pharmaceutical Product untuk Ekspor (10 HK menjadi 3 HK)
 - Proses sertifikasi cara distribusi obat yang baik (79 HK menjadi 49 HK)
 - Surat Keterangan Impor Obat/Bahan Obat (8 Jam menjadi 6 Jam)
 - Impor vaksin untuk penanganan COVID-19 (Integrasi Sistem dengan Bea Cukai, Kemenkes, dan Indonesia National Single Window/INSW) (6 Jam menjadi 2 Jam)
 - Analisa hasil pengawasan narkotika, psikotropika, dan prekursor (4 HK menjadi 3 HK)

b. Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (OTSKK)

1. Pelaku usaha dapat secara paralel melakukan proses registrasi produk OTSKK bersamaan dengan proses sertifikasi cara produksi obat tradisional yang baik (OPOTB) dengan proses pendaftaran akun;
2. Pelaku usaha dapat melakukan penggantian dokumen angka pengenal impor, tanda daftar perusahaan, dan surat izin usaha perdagangan dengan nomor induk berusaha yang terkoneksi pada OSS;
3. Simplifikasi pada persyaratan uji stabilitas bagi perusahaan clustering jalur hijau;
4. Percepatan pada proses registrasi/notifikasi produk OTSKK, yaitu:
 - Notifikasi parfum, notifikasi khusus ekspor, variasi kemasan, notifikasi produk kosmetik kit (KIT), dan clustering jalur hijau kosmetik (14 HK menjadi 3 HK)
 - Registrasi OT dan SK khusus ekspor (30 HK menjadi 3 HK)
 - Pra Registrasi OT dan SK (clustering jalur hijau) (20 HK menjadi 10 HK)
 - Registrasi OT dan SK (clustering jalur hijau) (30 HK menjadi 16 HK)
 - Registrasi OT Lowrisk (30 HK menjadi 7 HK)

c. Pangan Olahan

1. Review jalur registrasi berbasis risiko (risk based approach) yang berdampak pada penyederhanaan persyaratan dan percepatan proses, yaitu:
 - a. Data perizinan berusaha diambil dari nomor induk berusaha (NIB) yang terkoneksi dengan OSS;
 - b. Untuk pangan yang risiko menengah rendah (MR) hanya pemenuhan komitmen;
 - c. Penilaian hanya pada pemenuhan standar nasional Indonesia (SNI) untuk registrasi menengah tinggi (MT);
 - d. Penilaian hanya pada label dan kriteria keamanan tertentu untuk risiko tinggi dengan notifikasi.
2. Mendukung percepatan proses perizinan pangan olahan, antara lain:
 - a. Melaksanakan kegiatan jemput bola dan pendampingan ke pelaku usaha khususnya UMK/UMI melalui intensifikasi percepatan proses perizinan/jemput bola (coaching clinic, desk registration, bimbingan teknis);
 - b. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi registrasi RBA untuk pangan risiko MR dan MT;
 - c. Pelatihan registration officer (RO) berbasis kompetensi dalam melakukan evaluasi mandiri registrasi pangan MR;
 - d. Sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai registrasi pangan olahan berbasis risiko;
 - e. Menyusun pedoman/handbook registrasi pangan olahan sesuai komoditas untuk pangan olahan yang banyak diproduksi UMK;
 - f. Penyediaan sarana dan prasarana pelaku usaha berkebutuhan khusus.
3. Percepatan/simplifikasi untuk registrasi pangan olahan, terdiri dari:
 - Registrasi tingkat risiko MR (6 HK menjadi 1 HK)
 - Registrasi tingkat risiko MT untuk pangan wajib SNI (6-30 HK menjadi 6 HK)
 - Registrasi tingkat risiko tinggi dengan notifikasi (untuk pangan risiko tinggi dengan kriteria tertentu sesuai ketentuan, antara lain memiliki Program Manajemen Risiko (PMR), SNI Sukarela, Sertifikat Organik, dan merupakan pangan sejenis dari yang sudah terdaftar sebelumnya) (30 HK menjadi 16 HK)
 - Registrasi tingkat risiko tinggi (30 HK)

Lawan *Stunting* dengan Fortifikasi Pangan

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2019-2022

Menunjukkan Indonesia berhasil menurunkan angka *stunting* pada balita

Hasil SSGI

2019

27,7

2020

24,4

2021

↓ 2,8
21,6

05

Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi

04

Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat

03

Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan *interview* sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah

02

Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat

01

Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa

Meningkatkan kualitas Fortifikasi Pangan

5 PILAR STRANAS PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*





APA ITU FORTIFIKASI PANGAN

Fortifikasi adalah penambahan kandungan satu atau lebih zat gizi mikro (vitamin dan mineral) dalam pangan atau bahan pangan untuk:



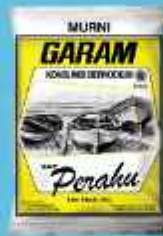
- ✓ Meningkatkan kualitas gizi pangan
- ✓ Memberikan manfaat kesehatan masyarakat dengan risiko minimal terhadap kesehatan
- ✓ Mengembalikan kandungan zat gizi mikro pada pangan yang hilang selama pengolahan

PANGAN OLAHAN WAJIB FORTIFIKASI



Tepung Terigu

Fortifikasi zat besi (Fe), seng (Zn), vitamin B1 (tiamin), vitamin B2 (riboflavin), dan asam folat (SNI 3751-2018)



Garam Konsumsi

Fortifikasi yodium (SNI 3556-2016)



Minyak Goreng Sawit

Fortifikasi vitamin A (SNI 7709-2019)

GANGGUAN KESEHATAN YANG DAPAT DICEGAH MELALUI FORTIFIKASI



Fortifikasi Tepung Terigu dengan Zat Besi

Mencegah anemia akibat kekurangan zat besi



Fortifikasi Minyak Goreng dengan Vitamin A

Mencegah gangguan penglihatan akibat kekurangan vitamin A



Fortifikasi Garam dengan Yodium

Mencegah penyakit gondok

...wujudkan generasi emas,
Ayo, bersama kita
lawan Stunting...!





Upaya Kolektif Menciptakan Masyarakat yang Lebih Aman dan Sehat

Penulis : Nelly Rachman
Editor : Dian Hermawati

Untuk melakukan pengawasan obat dan makanan yang optimal, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kapabel. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas menjadi krusial dalam memperoleh SDM yang profesional.

Tepat pada 31 Januari 2024 lalu, BPOM berusia 23 tahun menjadi lembaga yang diberi amanat untuk mengawasi obat dan makanan di Indonesia. Salah satu doa yang terus dipanjatkan setiap tahun adalah agar kehadiran BPOM dapat memberikan manfaat nyata seluas-luasnya bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Fungsi pengawasan obat dan makanan tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan, melainkan lebih luas lagi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan bahwa peran yang dimiliki oleh BPOM sangat strategis untuk memastikan peredaran obat dan makanan di Indonesia telah sesuai dengan standar keamanan. Oleh karena itu, Menteri PANRB berharap BPOM tidak hanya menunggu ada laporan masuk, namun lebih proaktif turun ke lapangan secara berkala untuk memastikan produk yang beredar aman untuk dikonsumsi masyarakat. Selain itu, BPOM diharapkan dapat melakukan penindakan secara tegas kepada perusahaan atau pelaku usaha yang mengedarkan obat atau makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pada kesempatan kali ini, Menteri PANRB turut berbagi pemikiran dan pandangan terkait koordinasi dan kolaborasi Kementerian PANRB dan BPOM dalam rangka memperkuat pengawasan obat dan makanan di daerah. Pandangan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Utama BPOM.

Menteri PANRB
Abdullah Azwar Anas



Sinergisme Kementerian PANRB dan BPOM

Kementerian PANRB memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien dan memastikan pelayanan publik yang prima. "Dalam konteks BPOM, koordinasi antara Kementerian PANRB dan BPOM dapat dilakukan terutama dalam mengoordinasikan kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan SDM, tata laksana, dan pengawasan di bidang obat dan makanan," papar Menteri PANRB. Koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik di sektor yang menjadi tanggung jawab BPOM.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa koordinasi Kementerian PANRB dan BPOM dilakukan terkait dengan kebijakan yang diemban oleh Kementerian PANRB seperti melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan Zona Integritas (ZI). Selain itu, Kementerian PANRB juga melakukan koordinasi dengan BPOM guna memastikan dukungan kelembagaan dan SDM di BPOM telah tepat fungsi dan tepat ukuran dalam mendukung BPOM mencapai tujuan strategis organisasi. Di bidang pelayanan publik, Kementerian PANRB bersinergi dengan BPOM dalam memberikan masukan dan saran perbaikan guna mendorong pelayanan publik yang lebih prima kepada masyarakat melalui kebijakan inovasi pelayanan publik dan koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Sinergi tersebut berbuah hasil yang baik. Pada tahun 2022, BPOM menerima 2 (dua) penghargaan dari Kementerian PANRB. Penghargaan pertama adalah TOP 46 Inovasi Pelayanan Publik untuk Inovasi Gerakan Mengawal Usaha Pertumbuhan Rakyat Jawa Timur (Gempur Jatim) yang diinisiasi oleh Balai Besar POM (BBPOM) di Surabaya. Kedua, untuk BBPOM di Yogyakarta yang meraih penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik "Pelayanan Prima" pada kategori Kementerian/Lembaga Umum.

Pada tahun 2023, BPOM memperoleh Top 99 Inovasi Pelayanan Publik



Mengenai meninjau laboratorium baku pembanding BBPOM di Yogyakarta sebagai laboratorium satu-satunya di UPT BPOM untuk membantu Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) dalam menyiapakan baku pembanding, Jumat (21/10/2022)

untuk Inovasi BERPENDAR (Bersama Memperoleh Izin Edar) milik BBPOM di Yogyakarta. Selanjutnya, BPOM melalui BBPOM di Yogyakarta menjadi salah satu dari lima unit penyelenggara pelayanan publik (UPP) K/L dengan nilai tertinggi untuk penyediaan sarana-prasarana ramah kelompok rentan.

Tak hanya itu, capaian Indeks RB BPOM mendapatkan kategori A dengan predikat "Sangat Baik" selama 4 tahun terakhir (2019-2022). Pada tahun terakhir, Indeks RB BPOM mencapai angka 84,61 dengan predikat A dan SAKIP dengan predikat A. "Hal ini menunjukkan pelaksanaan kebijakan RB, SAKIP, dan pelayanan publik telah terlaksana dengan baik di BPOM dan dapat menjadi contoh untuk instansi lainnya," tutur Menteri PANRB.

Koordinasi Kementerian PANRB dan BPOM di bidang kelembagaan pun telah berjalan dengan baik, antara lain terkait dengan penataan organisasi

BPOM dalam penyusunan kriteria dan penataan unit pelaksana teknis (UPT) dan penetapan UPT Loka POM menjadi Balai POM di Tarakan. Azwar Anas mengatakan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas, serta proporsionalitas organisasi BPOM telah dilakukan evaluasi kelembagaan dengan hasil penilaian sebesar 84,49 dengan predikat sangat efektif. Di tahun 2023, BPOM telah mengajukan 9 (sembilan) unit untuk dilakukan evaluasi zona integritas ke Tim Penilai Nasional dan terdapat 3 (tiga) unit kerja yang mendapatkan predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Penataan SDM BPOM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah mengamanahkan percepatan 7 (tujuh) transformasi dalam manajemen SDM Aparatur. Mulai dari sistem rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) yang harus lebih responsif dan mengacu

“Pelaksanaan kebijakan RB, SAKIP dan pelayanan publik telah terlaksana dengan baik di BPOM dan dapat menjadi contoh untuk instansi lainnya”





Menpan berbincang dengan salah seorang petugas pengujian BBPOM di Yogyakarta, Jumat (21/10/2022)

pada prioritas nasional, hingga digitalisasi manajemen ASN melalui *platform* digital yang akan menjadi salah satu bagian dari 9 (sembilan) layanan prioritas dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Digitalisasi ini juga berperan sangat penting dalam pengawasan sistem merit dan penguatan integritas dan interoperabilitas layanan ASN. ASN di seluruh instansi pusat dan daerah, termasuk BPOM, hendaknya memahami bahwa semangat UU ASN ini harus dibarengi dengan komitmen, serta kerja sama para pemimpin pada seluruh tingkatan di instansi pemerintah. Keberadaan pegawai ASN yang memiliki *growth mindset* juga diperlukan, sehingga UU ASN tersebut dapat dipahami dengan baik dalam penerapannya di Instansi Pemerintah.

"Saat ini, Kementerian PANRB juga tengah menyusun pedoman turunan dari UU ASN, salah satunya yakni rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Bersama-sama dengan BPOM, dukungan dan pendampingan terkait perbaikan manajemen SDM yang sudah terlaksana selama ini harus terus dilanjutkan agar kualitas pelayanan publik, terutama pada pengawasan obat dan makanan, dapat terlaksana secara prima dan berdampak kepada *stakeholder*," ungkap Azwar Anas.

Terkait penataan SDM, Kementerian PANRB mengapresiasi BPOM yang telah menetapkan Pedoman Arah Kebijakan Pengembangan Kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan. Menurut Menteri PANRB, BPOM telah

mengimplementasikan amanah UU ASN. Dalam UU ASN disebutkan bahwa pola pengembangan kompetensi tidak lagi hanya bersifat klasikal, seperti diklat formal, melainkan lebih menekankan pada pembelajaran berbasis pengalaman, seperti magang dan pelatihan langsung di lapangan.

Menteri PANRB menyebutkan bahwa di dalam Pedoman Arah Kebijakan Pengembangan Kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan terdapat pengembangan kompetensi melalui pendidikan pelatihan klasikal dan non-klasikal, serta pemanfaatan *platform* pembelajaran digital terintegrasi, yakni IDEAS (Integrated Development and Training Information System). "Ini sejalan dengan dengan salah satu modul yang nanti akan disediakan dalam *platform* digital aparatur negara yang dapat diakses seluruh ASN, yaitu modul pengembangan kompetensi secara nasional. Semakin fleksibelnya mekanisme pengembangan kompetensi ASN, diharapkan berdampak langsung terhadap kinerja ASN. Instansi pemerintah, termasuk BPOM wajib memberikan kemudahan akses belajar bagi pegawai ASN," tutur Menteri yang dilantik Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 September 2022.

Sinergi untuk Perlindungan Masyarakat Indonesia

BPOM menyadari sepenuhnya bahwa pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan oleh BPOM sendiri. Diperlukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan agar peningkatan

derajat kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa dapat tercapai optimal. Pilar pengawasan obat dan makanan yang efektif setidaknya memerlukan peran pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Hal ini disetujui oleh Menteri PANRB. "Sinergitas antara masyarakat dan BPOM menjadi kunci untuk memantau produk-produk yang beredar di pasaran," ujarnya. "Sebagai warga negara, masyarakat dapat berkontribusi secara aktif terhadap upaya ini dengan proaktif mengamati komposisi produk-produk yang mereka gunakan dan melakukan pelaporan jika ditemukan produk-produk yang mengandung komposisi yang tidak sesuai atau tidak tersertifikasi BPOM. Masyarakat harus tetap waspada dan laporkan segala kekhawatiran atau aktivitas menipiskan terkait distribusi atau penjualan barang di bawah standar," tambah mantan Bupati Banyuwangi ini.

Kementerian PANRB sendiri akan terus memberikan dukungan dan pendampingan kepada BPOM. Menteri kelahiran 8 Agustus 1973 ini menegaskan BPOM dan Kementerian PANRB harus semakin meningkatkan kerja sama untuk memastikan implementasi kebijakan terkait dengan RB, ZI, dan inovasi pelayanan publik. Ketiga kebijakan tersebut menekankan perbaikan pada tata kelola dengan melakukan inovasi dalam pelayanan publik dan upaya-upaya untuk menegakkan integritas pegawai. Seperti kebijakan zona integritas yang dapat mendorong unit-unit kerja di BPOM untuk berkompetisi antar satu sama lain dan mendorong terjadinya pertukaran *best practice* dari unit-unit yang telah mendapatkan predikat WBK/WBMM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Selain itu, laporan hasil evaluasi RB dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dapat menjadi acuan BPOM dalam melakukan perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kinerja BPOM.

"Ingat, upaya kolektif sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sehat. Dengan bekerja sama, kita dapat meningkatkan layanan publik, dan melindungi kesejahteraan setiap individu. Tetap terinformasi, tetap waspada, dan berkontribusi aktif untuk membangun Indonesia yang lebih aman dan sehat," tegas Menteri PANRB. ■

Perbedaan Krim Wajah



Etiket Biru

- ✓ Termasuk obat
- ✓ Diperoleh dengan resep dokter
- ✓ Dibuat di sarana pelayanan kefarmasian
- ✓ Mengandung bahan obat
- ✓ Label berupa etiket warna biru sarana pelayanan kefarmasian dengan informasi dan petunjuk penggunaan
- ✓ Batas waktu penggunaan 35 hari setelah pembuatan di bawah pengawasan dokter
- ✓ Tidak perlu memiliki izin

Kosmetik

- ✓ Termasuk kosmetik
- ✓ Dijual bebas sesuai ketentuan
- ✓ Diproduksi di industri kosmetik
- ✓ Tidak mengandung bahan obat
- ✓ Label berisi informasi produk, seperti tanggal produksi, kedaluwarsa, produsen/importir, dan lainnya
- ✓ Batas waktu penggunaan sesuai masa kedaluwarsa
- ✓ Memiliki nomor notifikasi BPOM (NA/NB/NC/ND/NE + 11 digit angka)

Yuk, lebih hati-hati dalam memilih krim wajah.

” Pilih krim wajah yang sesuai dengan penggunaannya, agar kulit kamu sehat dan terawat. ”



GALERI

Penulis : Benny Roblin
Editor : Dian Hermawati

Peresmian UPT Baru



Kediri - Kepala BPOM RI 2016-2023, Penny K. Lukito, menandatangani prasasti peresmian 8 Balai POM dan 3 Loka POM Baru, yaitu Balai POM di Payakumbuh, Tangerang, Tasikmalaya, Bogor, Surakarta, Kediri, Jember, dan Palopo, serta Loka POM di Kabupaten Sambar, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Sumba Timur. Penandatanganan dilakukan di Pendopo Kabupaten Kediri, Jawa Timur (25/10/2023). (Foto: Benny/HumasBPOM)

Sarasehan Pengembangan Produk Sorgum



1 Mojokerto - Perwakilan perguruan tinggi menandatangani komitmen pengembangan pangan alternatif berbahan dasar sorgum (02/11/2023). Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian kegiatan Sarasehan Jaminan Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Olahan Berbahan Dasar Sorgum yang turut menghadirkan stakeholders terkait dan pelaku usaha untuk mendorong pemanfaatan sorgum sebagai bahan baku pangan olahan. (Foto: Benny/HumasBPOM)

2a Mojokerto - Contoh biji sorgum yang dipamerkan saat acara Sarasehan Jaminan Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Olahan Berbahan Dasar Sorgum (02/11/2023), memiliki bentuk dasar seperti jagung dengan ukuran yang cenderung lebih kecil. BPOM menginisiasi kegiatan sarasehan untuk memadukan pengembangan dari hulu ke hilir diversifikasi sorgum, sehingga sorgum tidak hanya dikonsumsi sebagai pangan segar, namun juga dikonsumsi sebagai pangan olahan. (Foto: Benny/HumasBPOM)

Resistensi Antimikroba



Jakarta - Peringati Pekan Antimikroba Sedunia, BPOM gelar Talkshow Pengendalian Resistensi Antimikroba bertajuk Ngobrol Asik Antibiotik (22/11/2023). Resistensi antimikroba menjadi salah satu ancaman terbesar dalam kesehatan dan pembangunan global, sehingga perlu pengawalan seluruh stakeholders terkait untuk mengendalikan kejadian resistensi di masa mendatang dengan "Lindungi Diri, Lindungi Lingkungan, Buang Antibiotik Dengan Benar" sesuai tema pada talkshow ini.

(Foto: Benny/HumasBPOM)

Germas SAPA Awards



Jakarta - Plt. Kepala BPOM RI, L. Rizka Andalusia berfoto bersama penerima Germas Award di Auditorium Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (14/11/2023). Germas Award tahun 2023 diberikan kepada 5 kementerian dan lembaga yang melaksanakan pembudayaan Gerakan Hidup Sehat, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Kementerian Perhubungan, dan Badan Kesamaran Laut.

(Foto: Benny/HumasBPOM)



Jakarta - Plt. Kepala BPOM RI, L. Rizka Andalusia mewakili BPOM RI menerima penghargaan Terbaik Ketiga Germas Award tahun 2023 dari Presiden RI, Joko Widodo. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas di Auditorium Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (14/11/2023).

(Foto: Benny/HumasBPOM)



Penulis : Chandra Wino Adhanunggar
Editor : Dian Henniawati

Perjalanan Menuju Masa Depan: Pengembangan Sorgum sebagai Pilar Ketahanan Pangan dan Inovasi Makanan

Sorgum menjadi salah satu alternatif bahan pangan dengan kandungan gizi yang tidak kalah dari padi atau jagung. Pemanfaatan sorgum sebagai bahan pangan tidak hanya memperkaya diversifikasi pangan, tetapi juga potensial membuka peluang ekonomi bagi masyarakat Indonesia



Tanaman sorgum dan hasil olahan sorgum sebagai bahan baku pangan

Sorgum merupakan tanaman sereal yang berasal dari Afrika. Bentuknya seperti jagung, tetapi ukurannya cenderung lebih kecil. Sorgum pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di Indonesia pada 1970-an. Pengembangan sorgum di Indonesia awalnya lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pakan ternak, terutama di daerah-daerah dengan kondisi iklim kering. Namun pada awal 2000, sorgum mulai dikembangkan di Indonesia sebagai bahan pangan alternatif dan menjadi bagian dari upaya diversifikasi tanaman pangan.

Meskipun belum sepopuler padi atau jagung, namun beberapa upaya telah dilakukan untuk memperkenalkan dan mengembangkan tanaman ini di berbagai daerah. Sorgum dianggap sebagai tanaman yang dapat mendiversifikasi pola tanam dan sumber pangan alternatif. Sorgum memiliki keunggulan tahan di lahan yang minim kandungan air dan dapat tumbuh di berbagai kondisi tanah.

Hilirisasi sorgum mencakup serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dan mengembangkan produk-produk turunan dari sorgum. Tanaman ini berpotensi

mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan agrikultur. Proses hilirisasi sorgum melibatkan pengembangan berbagai produk turunan, seperti tepung sorgum, sirup sorgum, dan produk olahan lainnya. Tepung sorgum dapat digunakan sebagai pengganti tepung gandum pada berbagai produk roti dan kue. Sedangkan sirup sorgum dapat menjadi alternatif yang sehat karena mempunyai kandungan tinggi fruktosa.

Tak hanya itu, sorgum juga memiliki manfaat dari kandungan gizinya. Bagi yang memiliki alergi atau sensitif terhadap olahan dari gandum atau bahan



Ketua RMI PWNJ Daerah istimewa Yogyakarta, KH. Muhammad Nizam Yahya, berharap adanya keberlanjutan dari MoU dengan BPOM untuk berdayakan santri sebagai pelaku usaha pangan olahan berbasis sorgum

mengandung gluten, maka sorgum dapat menjadi alternatif bahan yang dapat digunakan. Sorgum pun memiliki kandungan serat, protein, dan beberapa mineral.

Dukungan Hilirisasi Sorgum

Untuk mendorong hilirisasi sorgum, dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait sangat penting. Salah satu peran BPOM dalam upaya diversifikasi pangan berbahan sorgum adalah melakukan pengawasan terhadap jaminan keamanan, mutu, dan gizi dari sisi hulu hingga ke hilir.

Kamis (02/11/2023), BPOM mengadakan kegiatan Sarasehan Jaminan Keamanan, Mutu, dan Gizi

Pangan Olahan Berbahan Dasar Sorgum. Kepala BPOM RI menyebut bahwa sarasehan ini diinisiasi untuk memadukan pengembangan dari hulu ke hilir diversifikasi (penganekaragaman) sorgum tidak hanya dikonsumsi sebagai pangan segar namun juga dikonsumsi sebagai pangan olahan.

"Tugas BPOM sebenarnya di hilir, memberikan nomor izin edar produk. Kami juga akan melakukan pendampingan di awal agar pelaku usaha tidak kaget dengan persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran," jelas Penny K. Lukito.

BPOM mengajak para pelaku usaha pangan olahan untuk memanfaatkan

sorgum sebagai bahan baku pangan olahan dan siap untuk melakukan bimbingan teknis serta pendampingan kepada para pelaku usaha, terutama usaha mikro dan kecil (UMK) yang memproduksi produk olahan sorgum. Dalam rangkaian sarasehan ini juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama stakeholders terkait Pengembangan Pangan Alternatif Berbahan Dasar Sorgum dengan Menjamin Keamanan, Mutu, dan Gizi pangan.

Dengan penelitian dan inovasi yang terus berkembang, sorgum telah menjelma dari sekadar tanaman pangan alternatif menjadi pilihan berharga dalam mendukung keberlanjutan pertanian, ketahanan pangan, dan industri makanan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk BPOM, dalam mempromosikan pemanfaatan sorgum sebagai bahan baku pangan olahan menandai langkah penting menuju sistem pangan yang lebih beragam, sehat, dan berkelanjutan. Selain itu, dapat membuka jalan untuk masa depan pengembangan sorgum sebagai bahan makanan menjanjikan kemajuan yang berkelanjutan dalam menciptakan sistem pangan yang lebih inklusif dan berdaya tahan.

Pemanfaatan sorgum sebagai bahan pangan bukan hanya memberikan peluang ekonomi, tetapi juga mendukung tujuan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui inovasi dan kolaborasi lintas sektor, hilirisasi sorgum dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif terhadap kesehatan masyarakat global. ■



Guru Besar ITS, Mukhamad Muryono menandatangani komitmen terkait pengembangan pangan alternatif berbahan dasar sorgum



Kepala BPOM saat itu tengah berbincang dengan Bupati Mojokerto, Iktina Fahmawati, mengenai hasil pangan olahan berbasis sorgum yang telah dikembangkan oleh masyarakat Mojokerto







Penulis : Zein Fadhlunrahman
Editor : Fatmahan Nur Hamidi

BPOM x *Beauty Enthusiast*: Kolaborasi Peningkatan Literasi Kosmetik Aman

"Halo guys, welcome back to my channel... Hari ini aku mau bikin one brand make-up tutorial lagi..." Sepenggal narasi reviu kosmetik dari salah satu beauty enthusiast ini menjadi daya tarik tersendiri. Karena itu keberadaannya penting diperhatikan agar mereka tidak hanya promosi, tapi juga memberikan edukasi bagi setiap generasi Indonesia.



Direktur Pengawasan Kosmetik BPOM Irwan, S.Si., Apt., MKM, memaparkan kepada Beauty Enthusiast terkait ketentuan peraturan di bidang kosmetik, Bekasi (23/11/2023)

Beauty enthusiast adalah sebutan untuk seseorang yang memiliki minat dan antusiasme tinggi terhadap produk kecantikan dan tren di dunia kecantikan. Hadirnya beauty enthusiast menjadi sebuah respon tersendiri dari masyarakat yang semakin peduli dengan penampilan. Melalui media sosial atau komunitas kecantikan, mereka berbagi pengalaman dan tips, menciptakan ruang untuk pertukaran ide dan inspirasi di tengah masyarakat.

Kosmetik kini telah menjadi bagian dari gaya hidup sebagian besar

masyarakat, terutama kaum urban. Posisinya memainkan peran penting dalam peningkatan penampilan diri, khususnya peningkatan kecantikan fisik. Kosmetik telah mengalami transformasi dari teknologi sederhana sampai dengan formulasi berbasis teknologi tinggi.

Di Indonesia, peningkatan tren kosmetik bisa dilihat dari kenaikan jumlah produk yang didaftarkan dari tahun ke tahun. Dari 2022 (64.685 produk ternotifikasi) sampai dengan 2023 (81.766 produk ternotifikasi) mengalami kenaikan sebesar 20,8 persen. Di sisi lain, pertumbuhan jumlah industri kosmetik

Indonesia mencapai 21,9 persen, yakni 913 perusahaan pada 2022 dan 1.010 perusahaan pada pertengahan 2023. (PPA Kosmetik Indonesia, 2023).

Noktah Hitam Tren Kecantikan

Naliknya tren kecantikan di Indonesia tidak hanya berdampak baik bagi pertumbuhan industri kosmetik. Di sisi lain tingginya permintaan disalahgunakan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi dan menjual kosmetik ilegal. Tidak hanya kosmetik tanpa izin edar, sebagian kosmetik tersebut juga

mengandung bahan yang dilarang dan berbahaya, seperti merkuri, hidrokinon, dan lainnya.

Celakanya, hadirnya penawaran kosmetik ilegal di pasaran masih diterima oleh masyarakat. Terhitung dari 2022 sampai dengan 2023, BPOM telah melakukan penindakan sebanyak 148 kali di seluruh Indonesia dengan total nilai temuan mencapai 64 miliar rupiah.

Selain pelanggaran terhadap legalitas produk, pelanggaran juga terjadi pada iklan atau cara mempromosikan produk kosmetik. Berdasarkan hasil pengawasan, pelanggaran iklan kosmetik masih cukup tinggi. Dalam tiga tahun terakhir, pelanggaran iklan rata-rata mencapai 22,66 %, dengan penyumbang terbesar dari media *online* yang rata-rata mencapai 78,76 %.

Kolaborasi BPOM dengan *Beauty Enthusiast*

Pada titik ini, BPOM perlu memperpanjang tangan untuk menyentuh pengetahuan masyarakat di dunia kecantikan dan komunitas di dalamnya. *Beauty enthusiast* adalah media yang tepat untuk memberikan ruang pencerahan. Pasalnya tren peredaran kosmetik di media *online* termasuk media sosial saat ini sangat dipengaruhi oleh ulasan para *beauty enthusiast* yang memiliki pengikut massif di media sosialnya.

Di tahun 2023, BPOM mengawali langkahnya untuk melakukan kolaborasi dengan para *beauty enthusiast*. Diawali pada Agustus 2023 dengan kegiatan

Ngopi Cantik: Kosmetik Abal-Abal, Makin Dijegal Makin Komersial dengan konsep *mini talkshow* di lokasi yang semi-formal, cafe daerah Jakarta Pusat. Kemudian dilanjutkan pada September 2023 melalui acara Forum Peningkatan Literasi Kosmetik bagi *Beauty Enthusiast*.



Buku saku Cara Pintar Memilih Kosmetik dan Cara Pintar Mempromosikan Kosmetik yang dipublikasikan BPOM di tahun 2023

BPOM akhirnya merangkul puluhan *beauty enthusiast* untuk peningkatan pemahaman dan literasi terkait regulasi kosmetik.

"Melalui kegiatan ini, mari kita bekerja sama menciptakan tren kosmetik yang tidak hanya indah dari segi estetika, tetapi juga aman dan berdaya saing di era digital ini," seru Reri Indriani di hadapan para *beauty enthusiast*.

Saat itu, BPOM bersama asosiasi *beauty enthusiast* menandatangani komitmen untuk senantiasa memberikan

masyarakat," jawab Kiera, salah satu *beauty enthusiast* ketika ditanyakan seberapa penting izin edar/notifikasi BPOM pada produk kosmetik.

Sebagai langkah nyata, BPOM juga meluncurkan *Cosmetic Handbook Series* untuk para *beauty enthusiast*. Buku saku ini berisi kiat memilih dan mempromosikan kosmetik di media *online* sesuai dengan ketentuan sebagai bahan mencerdaskan masyarakat.

Melalui buku saku Cara Pintar Mempromosikan Kosmetik, peraturan periklanan kosmetik lebih mudah dipahami oleh *beauty enthusiast* ketika melakukan *review*/promosi produk kosmetik. Buku ini juga merangkum serba-serbi cara memilih kosmetik yang aman.

Nantinya, para *beauty enthusiast* akan mendapatkan pemahaman yang berjenjang dari BPOM. Mulai dari pengetahuan regulasi yang dasar sampai dengan regulasi yang spesifik. Harapannya, ketika literasi *beauty enthusiast* sudah meningkat, masyarakat juga akan meningkat pengetahuannya untuk selalu menggunakan kosmetik aman yang sudah ternotifikasi di BPOM. ■



Winda Permata, seorang *beauty enthusiast* yang antusias bertanya terkait regulasi kosmetik, Bekasi (23/11/2023)



Ibu Pit, Deputi Bidang Pengawasan Obat bersama Dr. Martin Eisenhauer (WHO HQ), Dr. Tieqin Zhou (WHO HQ), Dr. Momoe Taisuchi (WHO Indonesia), dan Mrs. Teeranart JIVAPASARNPONG (Thailand) memandu WHO Workshop on Implementation of International Standards for Quality Control of Polio Vaccines including OPV and IPV, Jakarta (31/10/2023).



Penulis : Aisyah Utami Rahayu
Editor : Fathan Nur Hamidi

KOLABORASI WHO DAN BPOM MENUJU DUNIA BEBAS POLIO

Indonesia menjadi negara tuan rumah penyelenggaraan "WHO Workshop on Implementation of International Standards for Quality Control of Polio Vaccines including OPV and IPV" pada 31 Oktober - 2 November 2023 di Jakarta. Ajang internasional ini memegang peranan penting dalam mengakselerasi ketersediaan vaksin polio yang aman, berkualitas, dan bermutu. WHO dan BPOM menyadari kolaborasi menjadi kunci keberhasilan menuju dunia bebas polio.

Polio (Poliomyelitis) merupakan penyakit sangat menular yang disebabkan virus polio. Virus polio memasuki tubuh melalui mulut, air atau makanan yang telah terkontaminasi dengan bahan fekal/tinja/kotoran dari orang yang terinfeksi. Virus berkembang biak di usus dan dikeluarkan melalui fekal-orang yang terinfeksi. Kemudian virus ini dapat menular ke orang lain. Virus polio dapat menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan mendadak serta kecacatan permanen atau bahkan kematian akibat kelemahan pada otot pernafasan.

Virus polio dapat menginfeksi pada usia berapapun, terutama anak-anak di bawah usia 5 tahun. Virus polio dapat dengan cepat masuk ke negara yang bebas polio, dan menyebar dengan cepat di antara populasi yang tidak divaksinasi. Kegagalan memberantas polio dapat menyebabkan 200.000 kasus baru setiap tahunnya di seluruh dunia dalam dekade berikutnya. Oleh karena itu,

setiap negara mempertahankan cakupan vaksin polio yang tinggi, sehingga berkontribusi terhadap tujuan global pemberantasan polio.

Fondasi Kapabilitas Otoritas Regulator

Dalam mewujudkan dunia bebas polio, otoritas regulator obat di seluruh dunia memiliki peran krusial dalam memastikan vaksin polio aman, berkualitas, dan bermutu. Beberapa tahun terakhir, WHO telah memperbarui rekomendasi teknis agar selaras dengan kondisi vaksin polio saat ini serta, memastikan ketersediaan kasih kepanjangannya apa sejalan dengan strategi Inisiatif Pemberantasan Polio Global (*Global Polio Eradication Initiative/ GPEI*). Selain itu, berbagai standar pengukuran internasional dan teknologi kendali mutu (*quality control*)

QC) baru untuk vaksin polio telah dikembangkan.

Karena itu tahun 2023, Indonesia dipercaya oleh WHO untuk menjadi negara tuan rumah penyelenggaraan "WHO Workshop on Implementation of International Standards for Quality Control of Polio Vaccines including OPV and IPV". Workshop ini diikuti oleh para ilmuwan dari National Control Laboratory (NCL) Arab Saudi, Belanda, Belgia, Brazil, India, Indonesia, Iran, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Thailand, Tiongkok, dan Vietnam.

Mengapa Indonesia dipilih menjadi tuan rumah? Pertama, Indonesia memiliki produsen vaksin polio, PT Bio Farma. Vaksin polio tersebut termasuk Vaksin *novel Oral Polio Vaccine Tipe 2 (nOPV2)* yang merupakan vaksin polio oral jenis baru. Vaksin ini dikembangkan untuk mengatasi permasalahan *circulating Vaccine-Derived Polio Virus (cVDPV)*. Kedua, BPOM dinilai memiliki kapasitas dalam melakukan pengujian dan penilaian vaksin polio, termasuk vaksin nOPV2. Ketiga, BPOM merupakan regulator pertama di dunia (bersama dengan WHO) yang memberikan persetujuan penting *emergency* untuk vaksin nOPV2.

Workshop WHO ini bertujuan memberikan *update* dan meningkatkan pemahaman terkait standar internasional dalam rangka menjamin keamanan, efikasi, dan mutu vaksin polio (OPV dan IPV). Sejumlah kasus yang pernah terjadi dibedah bersama ahlinya di bidang pengembangan vaksin polio dari WHO Headquarters, George Washington University, University of Maryland, Health Canada, European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM) Perancis, Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) United Kingdom, King Mongkut's University Thailand, termasuk asosiasi global (PATH).

Dalam menyelaraskan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang vaksin polio, WHO Expert Committee on Biological Standardization (EOBS) telah memperbaharui pedoman vaksin polio terbaru yang bertajuk "Recommendation to Assure the Quality, Safety and Efficacy of Poliomyelitis Vaccine", yang disusun oleh Expert Committee on Biological Standardization (EOBS).



Suasana yang penuh keakraban pada pembukaan "WHO Workshop on Implementation of International Standards for Quality Control of Polio Vaccines including OPV and IPV" pada 31 Oktober – 2 November 2023 di Jakarta

Globalisasi Vaksin Polio Dalam Negeri

Dalam strategi eliminasi polio, vaksin polio terbaru, seperti nOPV, dengan stabilitas genetik yang lebih baik, akan sangat penting untuk mendukung tujuan akhir pemberantasan polio global. Vaksin nOPV2 yang diproduksi oleh PT Bio Farma digunakan untuk membantu dunia memberantas wabah polio, khususnya polio tipe 2. Kasus polio tipe 2 ini muncul kembali karena disebabkan oleh rendahnya cakupan vaksinasi polio, dalam jangka waktu yang cukup lama dan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Vaksin nOPV2 ini juga berperan dalam menanggulangi wabah polio yang terjadi di Pidie, Aceh Indonesia pada 2022.

Pemastian kualitas, keamanan, dan mutu vaksin polio sangat penting untuk masa depan dunia bebas polio. P. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM, Togi Junio Hutadju menekankan bahwa vaksinasi sebagai tindakan pencegahan polio merupakan hal yang penting mengingat belum adanya pengobatan untuk penyakit ini. Togi menekankan jaminan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin polio menjadi tugas bersama badan regulator dan industri farmasi.

"WHO menganjurkan vaksinasi penuh terhadap polio bagi semua anak di seluruh dunia dan setiap negara wajib untuk mempertahankan cakupan vaksin polio yang tinggi, sehingga dapat berkontribusi penuh terhadap misi global untuk memberantas penyakit polio," ucap P. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM.

Sedangkan Deputy WHO Representative untuk Indonesia, Dr. Momoe Takeuchi mendukung penuh kolaborasi ini untuk tujuan mulia dunia bebas dari polio. Ajang tahunan ini sebagai langkah menyatukan harmonisasi produksi dan pemastian mutu vaksin polio di antara produsen dan regulator. Sementara itu, ilmuwan dari Norms and Standards for Biologicals Team WHO, Dr. Tiequn Zhou berharap kegiatan ini dapat memfasilitasi dan mendorong penerapan standar WHO terkini untuk vaksin polio.

Kedepannya beberapa standar pengukuran internasional dan tata cara pengawasan (*quality control*) yang terbaru untuk vaksin polio akan terus dikembangkan agar selaras dengan kondisi global, sehingga pemastian ketersediaan vaksin polio yang terjamin kualitas, keamanan, dan efikasi terpenuhi. BPOM terus menjalin kolaborasi dan komunikasi dengan National Regulatory Authorities (NRAs) atau NRAs are national regulatory agencies di negara lain dan WHO melalui peningkatan kapasitas sistem regulatori, pertukaran informasi, dan pengalaman. ■





Penulis : Rini Setyowati
Editor : Fathur Nur Hamid

Resistensi Antimikroba, Pandemi Senyap yang Perlu Dikendalikan

Resistensi antimikroba menjadi salah satu isu utama global yang mengancam kesehatan umat manusia. Ironisnya ancaman ini tidak disadari oleh masyarakat, hingga WHO menyebutnya sebagai pandemi senyap (silent pandemic). Studi global menunjukkan sebanyak 4,9 juta jiwa di 204 negara meninggal dunia akibat resistensi antimikroba pada 2019, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Indonesia termasuk lima negara yang diproyeksikan akan mengalami peningkatan persentase penggunaan antimikroba pada 2030. Data surveilans *Antimicrobial Resistance (AMR)* Indonesia tahun 2019 dan 2020 yang diambil dari 20 rumah sakit menunjukkan peningkatan resistensi bakteri penyebab infeksi aliran darah, *E. coli* dan *K. pneumoniae* terhadap antibiotik golongan sefalosporin generasi ketiga dan fluorokuinolon.

Parahnya kasus AMR ini tidak sebanding dengan upaya dan lamanya waktu penelitian yang dibutuhkan untuk menciptakan antimikroba baru, di mana bisa memakan waktu hingga puluhan tahun. Antimikroba digunakan untuk mencegah, mengendalikan dan mengobati penyakit menular pada manusia, hewan dan tumbuhan, misalnya berupa antibakteri, antivirus dan antifungi.

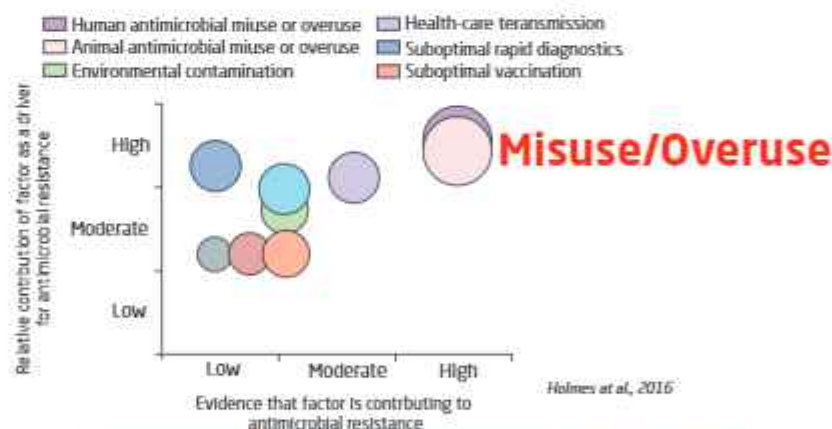
Resistensi antimikroba terjadi ketika mikroba seperti bakteri, virus, dan jamur mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Seketika pengobatan antimikroba tidak ampuh lagi. Hal ini membuat infeksi lebih sulit diobati, semakin parah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Dampak lainnya pada biaya pengobatan yang semakin membengkak.

Di Indonesia terdapat dua kluster pemicu terjadinya resistensi antimikroba. Pertama karena produk antimikroba yang digunakan adalah substandar atau bahkan palsu, sehingga mutunya di bawah standar dan tidak dapat menyembuhkan. Kedua karena perilaku masyarakat, di antaranya (1) Peresepan antimikroba yang tidak rasional, membeli antimikroba tanpa resep dokter; (2) Antimikroba dikonsumsi tidak sesuai ketentuan, seperti tidak dikonsumsi

sampai habis; (3) Membuang antimikroba sembarangan dan mencemari lingkungan; dan (4) Penggunaan antimikroba pada hewan yang tidak sesuai ketentuan.

Menurut penelitian WHO tahun 2016, penggunaan antimikroba yang tidak sesuai (*misuse*) atau penggunaan antimikroba berlebihan (*overuse*) baik di sektor manusia maupun hewan, merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya resistensi antimikroba.

Andalusia menegaskan kondisi ini tentunya memerlukan intervensi baik melalui edukasi kepada masyarakat maupun pengawasan distribusi antibiotik lebih ketat di Saryanfar. Pada 2021, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko/PMK) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi



Faktor penyebab Resistensi Antimikroba menurut penelitian WHO tahun 2016

Penyelewengan Antibiotik

Berdasarkan data pengawasan BPOM tahun 2021-2022, salah satu penyebab resistensi antimikroba adalah penjualan antibiotika di sarana pelayanan kefarmasian secara bebas. Hasil pengawasan BPOM menemukan 79,67% Sarana Pelayanan Kefarmasian (Saryanfar) pada 2021 dan 75,49% Saryanfar pada 2022 melakukan penyerahan antimikroba, khususnya antibiotika, kepada pasien tanpa resep dokter.

Pit. Kepala BPOM, L Rizka

Antimikroba Tahun 2020-2024.

BPOM menjadi salah satu anggota dalam Gugus Tugas Pengendalian Resistensi Antimikroba. Kebijakan BPOM terkait AMR dituangkan dalam Keputusan BPOM Nomor HK.02.02.1.2.03.20.98 Tahun 2020 yang mengatur peta jalan pengendalian AMR Tahun 2020 - 2024. BPOM terus melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan antimikroba. Salah satu upaya dengan berpartisipasi dalam The Global Action Plan on Antimicrobial Resistance (GAP-AMR) WHO.



Pit. Kepala BPOM, L Rizka Andalusi membuka Talkshow Pengendalian Resistensi Antimikroba Bersama Masyarakat, Selasa (22/11/2023).

“

Kita berpacu dengan waktu untuk mengendalikan resistansi antimikroba agar tidak berkembang menjadi ancaman bagi generasi mendatang. Perubahan perilaku dan budaya masyarakat bukan sebuah kemustahilan asalkan kita bersama-sama mengupayakannya sesuai kapasitas masing-masing

- Pit. Kepala BPOM RI, Lucia Rizka Andalusi -

”

Perlu One Health Approach

BPOM terus mengkampanyekan pengendalian resistansi antimikroba melalui World AMR Awareness Week (WAAW) atau pekan kesadaran Antimicrobial Resistance (AMR) yang jatuh pada 18 – 24 November. Momen penting ini menyadarkan semua pihak untuk berkolaborasi dalam pengendalian resistansi antimikroba.

Pemerintah, swasta, tenaga kesehatan, dan masyarakat harus berbagi peran melalui Strategi One Health Approach. Strategi pendekatan holistik/menyeluruh ini menempatkan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan sebagai hal yang saling

terkait dan saling bergantung.

Pada peringatan WAAW tahun 2023, BPOM menaungkan Aksi Bersama Cegah Resistansi Antimikroba. BPOM mengajak seluruh masyarakat luas, termasuk komunitas sekolah menengah atas, mahasiswa, Satuan Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan (Saka POM) dan organisasi masyarakat. Generasi muda menjadi salah satu sasaran dengan harapan dapat menjadi agen perubahan untuk masa depan. Ayo bersama kita lawan resistansi antimikroba menuju generasi sehat dan unggul guna mencapai visi Indonesia Emas 2045 yang bebas dari pandemi senyap. ■



Pit. Kepala BPOM, L Rizka Andalusi menyerahkan materi edukasi tentang resistansi antimikroba kepada perwakilan agen perubahan dari komunitas sekolah, mahasiswa, SAKA POM, tenaga kesehatan dan organisasi masyarakat, pada kegiatan Talkshow Pengendalian Resistensi Antimikroba Bersama Masyarakat, Selasa (22/11/2023).

ARTI ABC

- A Apa itu Resistansi Antimikroba?
- B Bahaya Resistansi Antimikroba
- C Cara mikroba menjadi resistansi

ARTI 4T

- 1 Tidak membeli antimikroba tanpa resep dokter dan tidak menyerahkan/menjual antimikroba tanpa resep dokter;
- 2 Teruskan pengobatan dengan antimikroba yang diresepkan (minum antibiotika yang diresepkan sampai habis);
- 3 Tidak membuang antimikroba rusak/sisa sembarangan sehingga dimanfaatkan oleh oknum atau dapat mencemari lingkungan;
- 4 Tegur dan laporkan jika mengetahui ada sarana yang menjual antimikroba sembarangan/tanpa resep.



Penulis : Anitha Dindi S.
Editor : Gita Indah Mundy S.

Tenaga Kesehatan: Ujung Tombak Penerapan Monitoring Efek Samping Obat Bahan Alam

Persepsi "alami selalu berarti aman" menimbulkan risiko bagi keselamatan masyarakat. Sebagian besar bahan alam memang aman dikonsumsi, namun pada kenyataannya beberapa bahan alam dapat juga menimbulkan dampak/ risiko bagi kesehatan, salah satunya adalah efedra (Ma Huang). Sebuah kasus kontroversial yang mendapat perhatian luas dan memainkan peran besar dalam penilaian terhadap keamanan efedra adalah kematian seorang pemain profesional american baseball, Steve Bechler, pada 2003.

Steve Bechler, seorang pitcher yang pada saat itu berusia 23 tahun, meninggal dunia pada 17 Februari 2003. Hasil autopsi menunjukkan bahwa tubuhnya mengandung jumlah efedra yang signifikan, yang diduga kuat berperan dalam kematiannya. Bechler diketahui mengonsumsi secara rutin produk penurunan berat badan yang mengandung efedra. Efedra merupakan sebuah tanaman yang telah digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok selama ribuan tahun. Efedra ini mengandung efedrin, sebuah senyawa yang dapat merangsang sistem saraf pusat.

Insiden tersebut mendorong United States Food Drug Authority (U.S. FDA) untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap keamanan produk yang mengandung efedra. Pada 2004, U.S. FDA mengeluarkan regulasi yang melarang penggunaan produk yang mengandung efedra. Langkah tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa efedra dapat menyebabkan risiko kesehatan serius seperti peningkatan tekanan darah, masalah jantung, hingga kematian. Terutama jika digunakan dalam dosis tinggi atau jangka waktu yang lama.

Pengalaman ini mengajarkan bahwa risiko penggunaan produk bahan alam itu tetap ada. Seperti halnya obat kimia, obat bahan alam juga memiliki efek samping, yang mungkin bersifat merugikan. Beberapa efek samping yang dilaporkan terkait dengan produk obat

bahan alam sering kali disebabkan oleh masalah kualitas, kontaminasi, interaksi, kesalahan penggunaan spesies bahan alam, kesalahan indikasi, dan kesalahan dosis. Oleh karena itu, pemantauan ketat terhadap keamanan produk obat bahan alam menjadi sangat penting dilakukan untuk mencegah risiko bahaya kesehatan di kemudian hari.

Monitoring Efek Samping Obat Bahan Alam dan Peran Tenaga Kesehatan

Sebagai warisan budaya takbenda UNESCO, jamu (obat bahan alam) perlu ditingkatkan daya saingnya. BPOM bertanggung jawab untuk memastikan keamanan, khasiat, dan mutu produk obat bahan alam (OBA) beredar secara menyeluruh, baik sebelum maupun setelah produk tersebut dipasarkan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing OBA. Menurut data registrasi, selama periode lima tahun terakhir, sekitar 30 ribu produk OBA telah terdaftar di BPOM, dengan jumlah yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pemantauan kejadian tidak diinginkan (KTD)/efek samping pada penggunaan produk OBA, seperti halnya monitoring efek samping obat, merupakan bagian dari pengawasan post-market. Tujuannya adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat. Bukti yang berkembang menunjukkan bahwa efek samping OBA sebenarnya dapat dipegang, terutama dengan pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan pemantauan aspek keamanan OBA, yang dikenal sebagai monitoring

efek samping.

Jumlah laporan monitoring efek samping OBA yang diterima oleh BPOM masih relatif rendah. Dalam lima tahun terakhir, hanya ada 297 laporan yang masuk. Masih diperlukan upaya optimalisasi peran dan intensifikasi kolaborasi lintas sektor terutama untuk meningkatkan efektivitas monitoring efek samping produk OBA.

Dalam monitoring efek samping OBA, partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam siklus produk sangatlah penting, termasuk tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dan penyerahan produk farmasi kepada pasien, memiliki peran yang krusial dalam monitoring efek samping OBA. Ini sejalan dengan amanah dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, dan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas sebagaimana telah diubah dengan Permenkes Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Ketiga regulasi tersebut menegaskan bahwa monitoring efek samping merupakan salah satu aspek dari pelayanan farmasi klinik yang harus dipatuhi dalam standar pelayanan.

Tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, apoteker, dan bidan memiliki peran sentral dalam mengumpulkan informasi tentang KTD/efek samping yang dialami pasien selama menggunakan OBA serta melaporkannya sebagai bagian dari tanggung jawab profesi. Selain itu, tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada pasien tentang potensi efek samping OBA yang mungkin terjadi dan mengajari mereka cara mengenali serta melaporkan efek samping yang mereka alami. BPOM telah menyusun pedoman yang dapat digunakan oleh tenaga kesehatan sebagai panduan dalam melaksanakan monitoring efek samping OBA.



QR Code untuk unduh pedoman

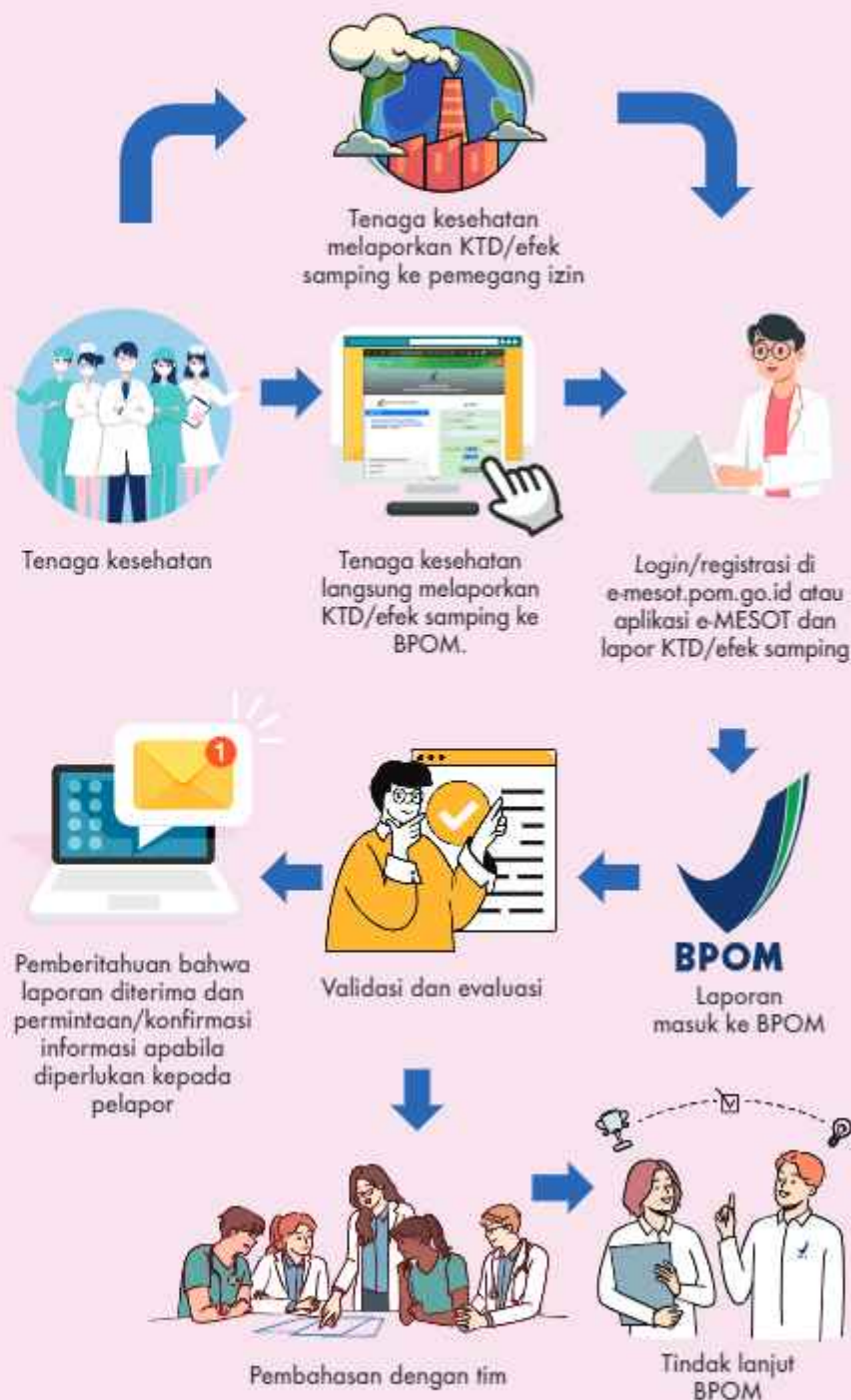
Aplikasi Pelaporan Monitoring Efek Samping

BPOM telah memanfaatkan digitalisasi melalui penerapan teknologi informasi dalam proses pelaporan monitoring efek samping, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan pemantauan keamanan. Penggunaan aplikasi e-MESOT yang sistem pelaporannya telah diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, memungkinkan akses yang lebih mudah bagi tenaga kesehatan untuk melaporkan monitoring efek samping OBA. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat interaksi dan kolaborasi antara BPOM dengan semua pemangku kepentingan terkait.

Dalam penyiapan pelaporan KTD/ efek samping, para tenaga kesehatan diharapkan bekerja sama dengan pasien atau keluarganya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Informasi tambahan dapat diperoleh dari rekam medis pasien guna melengkapi laporan tersebut.

Dengan keterlibatan aktif dan kolaborasi antara berbagai pihak serta pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan monitoring efek samping produk OBA dapat berjalan secara efektif. Hal ini tidak hanya untuk melindungi keselamatan pasien, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kebijakan kesehatan masyarakat. ■

Alur Pelaporan KTD/Efek Samping Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan melalui e-reporting





Penulis : Dewi Oktaviani
Editor : Gita Indah Nandya S.

Kolaborasi Efektif Hasilkan Produk Biologi Inovatif

Industri farmasi dalam negeri nyatanya mampu unjuk gigi dengan diproduksi produk biopharmaceutical golongan erythropoiesis stimulating agents pertama di Indonesia. Penerbitan produk paten biologi bernama efepoetin alfa (Efesa) ini membuktikan kemampuan Indonesia dalam mengembangkan produk baru, mulai dari pembuatan bahan baku, produk jadi, uji klinik hingga akhirnya resmi diberikan izin edar oleh BPOM.

Efesa tak hanya sekadar menjadi produk biologi baru, melainkan menjadi simbol kemajuan bagi dunia kefarmasian di tanah air. Kolaborasi antara regulator, industri, *principal investigator*, dan dokter peneliti membawa Efesa ke hadapan masyarakat sebagai produk paten biologi yang menghadirkan solusi bagi produksi sel darah merah dalam pengobatan anemia pada pasien penyakit ginjal kronis tanpa cuci darah. Tak dipungkiri, keberadaan Efesa memberikan kontribusi penting bagi terapi penyakit ginjal kronis yang merupakan masalah kesehatan serius pada kelompok penyakit tidak menular (PTM).

Keberhasilan Efesa merambah ke masyarakat setelah memperoleh izin edar BPOM yang diserahkan secara langsung oleh Kepala BPOM kala itu,

Penny K. Lukito saat konferensi pers pada Senin, 23 Oktober 2023 lalu. Peristiwa ini menjadi langkah bersejarah bagi dunia industri farmasi Indonesia sebagai bentuk kemandirian industri farmasi nasional. PT Kalbe Farma Tbk khususnya PT Kalbe Genexine Biologics (KGBio) telah menjadi pionir dalam pengembangan dan produksi

efepoetin alfa dalam negeri. Ini menjadi bukti konkret penerapan Inpres Nomor 6 Tahun 2016 dalam rangka mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing industri farmasi dalam negeri.

Mengenal Efesa

Efesa telah muncul sebagai salah satu terobosan baru dalam dunia



farmasi. Merupakan senyawa baru turunan erythropoietin, yaitu hormon yang berfungsi untuk mengatur produksi sel darah merah di sumsum tulang. Efesa dibuat melalui teknologi rekombinan dengan penggabungan protein antara epoetin dan immunoglobulin. Gabungan protein ini menghasilkan molekul yang lebih besar dan waktu paruh yang lebih panjang serta memiliki tingkat pembersihan/clearance dari hati dan ginjal yang lebih rendah. Inovasi ini membuka pintu bagi pengembangan terapi yang lebih efektif dan efisien dalam penanganan anemia pada pasien ginjal kronia.

Efesa ini telah melalui serangkaian uji klinik. Uji klinik fase I dan II dilakukan di Korea dengan menggunakan zat aktif efepoetin produksi Green Cross Korea (GX-E2), sedangkan uji klinik fase III menggunakan efepoetin alfa produksi PT Kalbio Global Medika (GX-E4) dengan *working cell bank* yang disponsor dari Genexine Korea. Tahap uji klinik fase III dilakukan secara multinasional dan multisenter di Indonesia, Australia, Taiwan, Malaysia, dan Filipina dengan melibatkan 386 subjek.

Efesa tidak hanya menjadi produk biologi efepoetin alfa pertama yang diproduksi secara lokal di Indonesia, tetapi juga membawa perubahan besar dalam pengobatan anemia. Keunggulan

Efesa terletak pada kemampuannya mengoptimalkan waktu dan biaya bagi pasien. Dengan pemberian suntikan hanya 1 kali dalam sebulan, Efesa menawarkan alternatif yang lebih efisien dibandingkan dengan pengobatan erythropoietin biasa yang memerlukan suntikan dua kali seminggu.

Pengawasan BPOM untuk Efesa

Sejak awal pengembangan Efesa pada 2019, BPOM telah memberikan dukungan kuat melalui berbagai inisiatif. BPOM tidak hanya memfasilitasi pengembangan produk biologi, tetapi juga memberikan dukungan investasi melalui sertifikasi fasilitas produksi dan penilaian produk biologi. Selain itu BPOM juga aktif mendorong kepatuhan pelaku usaha dan peningkatan daya saing. Tak hanya itu, BPOM juga mengawal langsung PT Kalbio Global Medika sebelum dan sepanjang proses pembangunan fasilitas produksi hingga sertifikasi fasilitas produksi bahan baku dan obat jadi agar memenuhi ketentuan cara pembuatan obat yang baik (CPOB).

BPOM juga telah mengawal pengembangan Efesa dan memberikan persetujuan proses pengembangan obat baru serta pelaksanaan uji klinik multisenter di Indonesia dan beberapa negara lain setelah semua persyaratan dipenuhi. Di Indonesia,

BPOM memberikan persetujuan pelaksanaan uji klinik di lima rumah sakit terkemuka di Jakarta, yaitu di RS Primaya PGI Cikini, RS Islam Jakarta Cempaka Putih dan Pondok Kopi, RSUP Fatmawati, serta RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSOM). BPOM juga memberikan pendampingan yang komprehensif selama proses registrasi hingga terbitnya izin edar Efesa. Berdasarkan hasil evaluasi BPOM yang dilakukan secara komprehensif, Efesa menunjukkan efek yang sebanding dengan produk sejenis dan dapat ditoleransi dengan baik. Profil keamanannya pun teruji, dengan efek samping yang ringan hingga sedang, umumnya berupa sakit kepala dan rhinorrhea (pilek). Hal ini tentu merupakan kabar baik bagi masyarakat dan dunia medis.

BPOM tidak hanya berperan dalam penerbitan izin edar Efesa, namun juga bertanggung jawab untuk memastikan konsistensi keamanan dan mutu Efesa ke depannya. Langkah tersebut diwujudkan melalui pengawasan yang ketat mulai dari distribusi rantai dingin (*cold chain distribution*) pada suhu 2-8°C hingga farmakovigilans Efesa melalui pelaporan *periodic safety update report* dan pelaporan efek samping oleh klinisi/fasilitas kesehatan.

Presiden Komisaris PT Kalbe Farma, Irawati Setiady, mengapresiasi BPOM yang telah memberikan pengawasan dalam menjadikan Efesa sebagai produk efepoetin alfa pertama di Indonesia dan bahkan yang pertama di dunia. Ungkapan ini menjadi puncak rasa bangga yang dirasakan oleh seluruh komponen anak bangsa yang telah berhasil melahirkan obat pertama di dunia dan dapat membantu mengatasi anemia untuk pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal.

Dengan semakin meningkatnya kemandirian industri dalam negeri dalam memproduksi produk dan inovasi terbaru, akan meningkatkan ketersediaan produk dalam negeri yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengobatan lainnya. Di tengah tantangan global, BPOM siap menjadi garda terdepan dalam mendukung dan mendampingi setiap langkah menuju kemajuan dan kemandirian industri dalam negeri. ■





Belajar Kerukunan dari Masyarakat Pulau Alor

Penulis : Benny Robin
Editor : Fathian Nur Hamid



Masjid Babul Jihad yang masih dalam tahap pembangunan (16/10/2023). Masjid ini salah satu dari banyak rumah ibadah umat muslim di Kabupaten Alor.

Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, mendapat anugerah Harmony Award Tingkat Nasional dari pemerintah pusat pada Februari 2017 lalu. Alor menjadi contoh bagaimana hidup beragama yang berbeda-beda justru menjadi kekuatan dari sebuah daerah. Kerukunan yang sudah turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang mereka merupakan modal sejarah yang harus terus dijaga.

Berbeda keyakinan membuat warga Alor semakin kuat toleransinya, hal ini kami saksikan saat tim MaPOM berkesempatan mengunjungi Kabupaten Alor pada Oktober 2023 lalu. Dari letak geografisnya Kabupaten Alor terdiri dari 3 pulau antara lain, Pulau Alor, Pulau Pura, dan Pulau Pantar.

Tim MaPOM berkesempatan mengelilingi Pulau Pura menggunakan kapal penduduk setempat untuk melihat

keindahan dari pesisir Alor yang terkenal indah. Kehidupan masyarakat Alor terlihat sangat sejuk. Tiap desa di pesisir Pulau Pura memiliki keberagaman kepercayaan, namun dapat hidup rukun berdampingan. Di pulau yang tergolong berukuran kecil ini, kami melihat masjid dan gereja yang menjadi simbol desanya masing-masing.

Dari informasi yang kami dapat melalui warga setempat, secara umum warga muslim tinggal di kawasan pesisir. Sedangkan non-muslim di wilayah pegunungan. Meski secara geografis terpisah, tapi masyarakat di Alor diakui begitu kuat menjaga kerukunan dan toleransi. Gereja bisa dibangun oleh umat muslim, begitu pun sebaliknya. ■



Gereja Harilolong di Pulau Pura, Kabupaten Alor. Pulau Pura ini berada di antara Pulau Pantar dan Pulau Alor.



Nelayan Pulau Pura

Cedang mencari ikan menggunakan alat bernama Bubu yang terbuat dari bahan bambu (17/10/2023). Alat untuk menangkap ikan nelayan Alor ini sangat tradisional, cara menggunakannya dengan memasangnya di kedalaman sekitar 6 meter.



GMIT Maranatha Limarahing
di Pulau Pura Kabupaten Alor.



Masjid Darussalam Timuabang,
di Pulau Pura Kabupaten Alor.



Batasan Jumlah Pemasukan

Pangan Olahan dari Luar Negeri

**Tujuan Penggunaan
Sendiri/Pribadi**

01

Produk Pangan untuk Keperluan Gizi Khusus
Sesuai dengan resep dokter

02

Pangan Olahan Lain (kecuali minuman beralkohol)
5 kg per-penumpang/penerima

A Documentary Film By : Humas BPOM

JELAJAH

EPISODE RAMADAN

Cahaya Kebaikan Di Perbatasan

"Jelajah" sebuah karya film dokumenter sebagai representasi pengawasan BPOM hingga pelosok negeri. Episode perdana ini, menghadirkan cerita intensifikasi pengawasan BPOM selama Ramadan hingga Idulfitri. Batam menjadi latar lokasi karena posisinya yang strategis sebagai *entry gate* produk pangan yang kini menunjukkan banyak kemajuan.



WELCOME TO BATAM



pom.go.id



[@bpom_r1](https://www.instagram.com/bpom_r1)



[@bpom_r1](https://twitter.com/bpom_r1)



[@bpom.official](https://www.facebook.com/bpom.official)



[@bpom.official](https://www.youtube.com/bpom.official)





Selamat
idul Fitri
1445 H | 2024 M

Minal Aidin wal Faizin,
Mohon Maaf Lahir dan Batin